

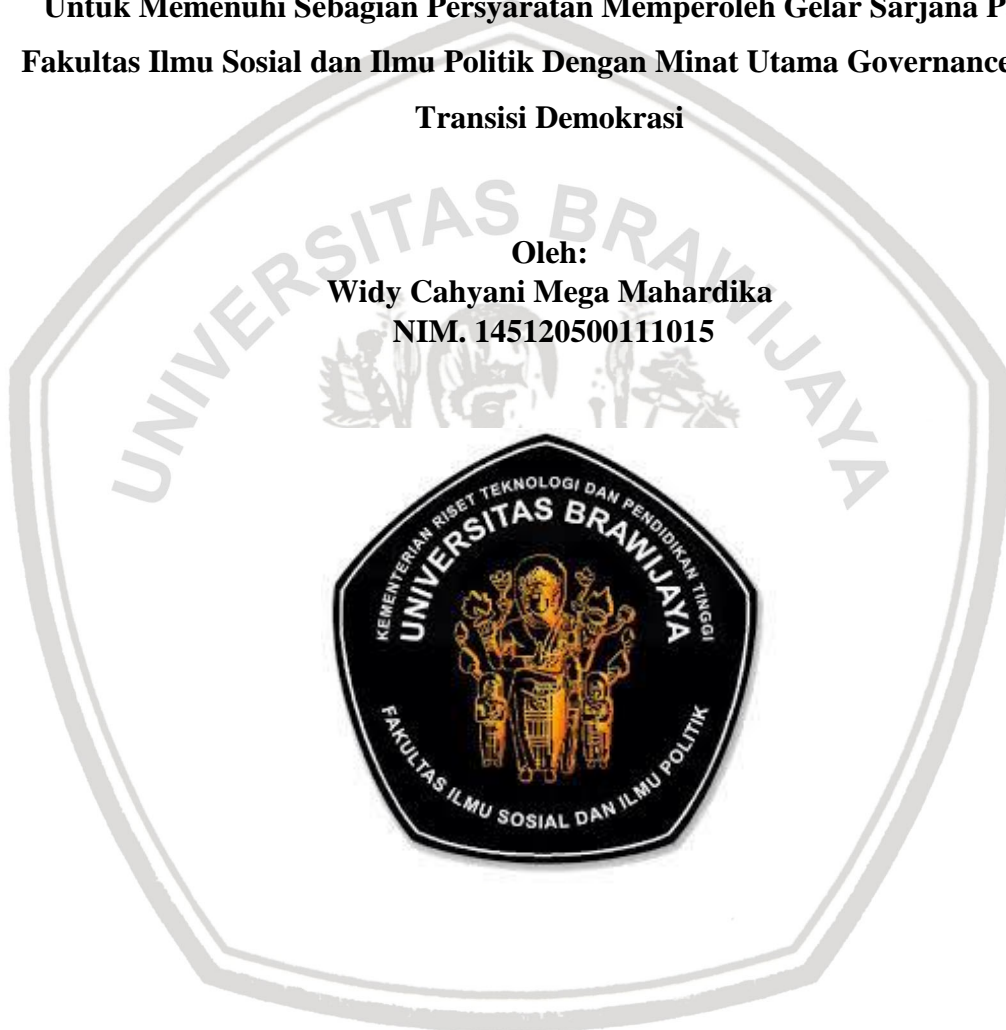
**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAMONGAN *GREEN AND CLEAN* DALAM PRESPEKTIF *ENVIRONMENTAL GOVERNANCE***

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Governance Dan  
Transisi Demokrasi**

**Oleh:**

**Widy Cahyani Mega Mahardika  
NIM. 145120500111015**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU POLITIK, ILMU PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN  
INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**

## ABSTRAK

**Widy Cahyani Mega Mahardika, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Analisis Implementasi Kebijakan Lamongan *Green and Clean* dalam Prespektif *Environmental Governance*. Tim Pembimbing: Taufik Akbar, S.IP., M.IP dan Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP.**

---

Permasalahan sampah merupakan bagian dari konsekuensi hidup karena setiap aktifitas yang dilakukan masyarakat pasti menghasilkan sampah. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk tidak terlalu banyak, akan tetapi kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup masih sangat kurang. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan, diantaranya terdapat sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang berupa program Lamongan *Green and Clean* dan Bank Sampah. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan Lamongan *Green and Clean* dalam prespektif *environmental governance*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melalui teknik wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dengan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Kemudian, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *environmetal governance* dan Lamongan *Green and Clean*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean* apakah sudah mampu menerapkan prinsip *environmental governance*.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* jika dilihat dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sudah cukup baik. Akan tetapi jika dilihat dari prespektif *environmental governance* program ini sepenuhnya belum mampu menerapkan prinsip *environmental governance*.

**Kata kunci:** Lamongan *Green and Clean*, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Implementasi Kebijakan, *Environmental Governance*

## ABSTRACT

**Widy Cahyani Mega Mahardika, Bachelor Program, Study Political Science, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Analysis Of Lamongan's Green and Clean Implementation Policies In Environmental Governance Perspective. Supervised by: Taufik Akbar, S.IP., M.IP dan Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP**

---

Waste problem is a part of the consequences in life since every activity society do absolutely leaves some waste. The total population of a city or town highly affects the amount of waste. Lamongan district is one of the regions that has low total population, however its society's awareness in taking care of the environment is still very weak. According to that, Lamongan district government issues a regulation on environment management one of which is waste management system based on 3R (reduce, reuse and recycle) in the form of Lamongan Green and Clean and Bank of Waste program. This research will analyse the policy of Lamongan Green and Clean through the perspective of environmental governance.

The methods used in this research are qualitative descriptive by using interview technique, observation, literature review and documentation. The theories that will be used in this research is public policy theory with analysis model of Van Meter and Van Horn implementation. Furthermore, the concept of this research are environmental governance and lamongan Green and Clean. This research aims to describe the implementation of Lamongan Green and Clean policy whether it is capable in applying environmental governance principle.

It then can be concluded that based on the policy implementation model of Van Meter and Van horn, the implementation of Lamongan Green and Clean is sufficiently decent. On the other hand, based on the environmental governance perspective, this program is fully unable to apply environmental governance principle.

**Keywords: : Lamongan Green and clean, Environment, Waste management, Policy implementation, Environmental Governance**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Analisis Implementasi Kebijakan Lamongan *Green and Clean* Dalam Prespektif *Environmental Governance*** dapat terselesaikan. ini dapat diselesaikan dengan lancar oleh penulis.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kedua Orangtua penulis, Mama dan Ayah yang selalu memberikan dukungan baik berupa doa, semangat, maupun materi, serta kakak penulis, yang selalu memberikan semangat dan saran agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Taufik Akbar, S.IP., M.IP dan Bapak Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan masukan dan ilmu yang sangat berarti selama bimbingan skripsi saya.
3. Dicky Darmawan dan Siti Utari Dewi yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan senantiasa menemani penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini. Tanpa kalian pengerjaan skripsi ini dapat berjalan sulit.

4. Risma, Dina, Yoka, Cyntia, Amirul, Aries, Yuki yang telah banyak membantu menyusun penelitian ini dengan bertukar pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Nevi, Tutut, Ayu, Rindah, Hani yang selalu setia menemani penulis, serta memberikan dukungan dan doa saat penulis mengalami kesulitan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Keluarga Wonderland (Nevi, Admira, Shintia, Risma), selaku selaku keluarga kecil penulis di Kota Malang yang selalu memberikan keceriaan dan dukungan.
7. KHP (Dina, Admira, Yoka, Kiky, Amalina, Cyntia, Dealita, Oggy, Ersha) yang telah memberikan semangat, doa, motivasi serta menghibur penulis saat jenuh dalam menjalani masa perkuliahan hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabat tersayang di Lamongan (Lisa, Ica, Bait, Habibi, Tari, Rila, Silvy, Dian dan Nanda) yang selalu memberikan doa dan semangat bagi kelancaran skripsi penulis.
9. Keluarga besar Ilmu Politik angkatan 2014, Universitas Brawijaya, Malang.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi yang disusun oleh penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis serta teman-teman yang kelak akan melakukan penelitian selanjutnya.

Malang, September 2018



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Akademis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Teoritis .....	10
2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.2 Kerangka Konseptual .....	17
2.2.1 Environmental Governance .....	17
2.2.2 Lamongan Green and Clean .....	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	24
2.4 Kerangka Pemikiran dan Pendekatan Penelitian .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Fokus Penelitian .....	30
3.3 Lokasi dan Objek Penelitian.....	31
3.4 Teknik Pemilihan Informan.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Instrumen Penelitian.....	35

3.7 Sumber Data .....	36
3.8 Teknik Analisis Data .....	37
3.9 Uji Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan .....	40
4.2 Gambaran Umum Kebijakan Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	45
4.1.1 Sasaran Kebijakan Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	49
4.1.2 Tujuan Kebijakan Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	51
<b>BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	<b>53</b>
5.1 Implementasi Kebijakan Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	53
5.2 Analisis Isi Kebijakan Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	58
5.2.1 Standar atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan .....	58
5.2.2 Sumber – Sumber Kebijakan.....	67
5.2.3 Ciri – Ciri Karakteristik Badan Pelaksana .....	69
5.2.4 Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan – Kegiatan Pelaksana .....	71
5.2.5 Sikap para Pelaksana .....	72
5.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	73
5.3 Dampak Lingkungan Serta Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	74
5.3.1 Dampak Pelaksanaan Kebijakan Lamongan <i>Green and Clean</i> ..	74
5.3.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Lamongan <i>Green And Clean</i> .....	79
5.3.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Lamongan <i>Green And Clean</i> .....	80
5.4 Tinjauan Kebijakan Lamongan <i>Green and Clean</i> Terhadap Prinsip- Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> .....	83
5.4.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	84
5.4.2 Pengakuan Terhadap Keterbatasan Daya Dukung Ekosistem Dan Keberlanjutan .....	86

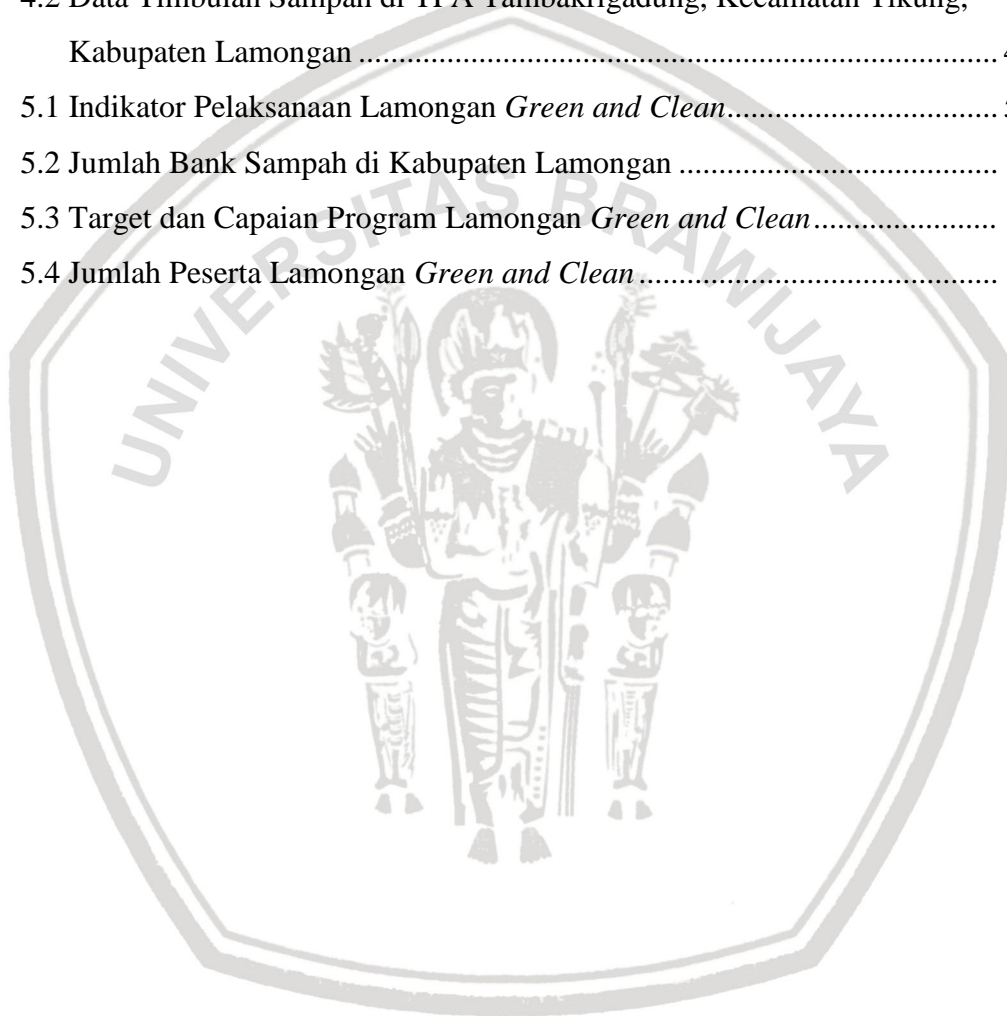
5.4.3 Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat .....	87
5.4.4 Transparansi .....	88
5.4.5 Kejelasan Masalah Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lamongan .....	89
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
6.1 Kesimpulan .....	92
6.2 Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN.....	99





## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
2.2 Daftar Informan .....	32
4.1 Luas Wilayah (Km2) dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Hasil Sensus Penduduk 2010 dan 2017 .....	42
4.2 Data Timbulan Sampah di TPA Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan .....	46
5.1 Indikator Pelaksanaan Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	59
5.2 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Lamongan .....	64
5.3 Target dan Capaian Program Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	74
5.4 Jumlah Peserta Lamongan <i>Green and Clean</i> .....	76



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn .....	14
2.2 Bagan Kerangka Pikir Penelitian .....	27
4.1 Peta Kabupaten Lamongan .....	40
5.1 Tempat Sampah Organik dan Anorganik, Warga Desa Made RT 03, RW 03, Kecamatan Lamongan .....	61
5.2 Pelaksanaan Bank Sampah di Desa Made .....	66
5.3 Ikon Produk dari Desa Made RT 03, RW 03, Kecamatan Lamongan .....	67
5.4 Kondisi Wilayah di Kabupaten Lamongan .....	78



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup belakangan ini mendapatkan perhatian khusus baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Tingginya laju pertumbuhan penduduk serta kemajuan industrialisasi menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain berkurangnya ruang terbuka hijau, permasalahan lingkungan yang umum terjadi adalah besarnya jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data Statistik Persampahan Indonesia KNLH-RI (2008), dengan populasi penduduk Indonesia sebanyak 232.656.251 orang, timbunan sampah yang dihasilkan adalah sekitar 43.213.557 m<sup>3</sup> per tahun dan yang masuk ke TPA hanya sekitar 13,8 juta m<sup>3</sup> per tahun, sedangkan yang didaur ulang di sumber sampah hanya sekitar 2,6% dari total keseluruhan sampah yang ditimbulkan, didaur ulang di TPS sekitar 2,01% dan didaur ulang di TPA sekitar 1,6%.<sup>1</sup>

Selama ini kebanyakan kota di Indonesia menerapkan sistem pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sistem pengelolaan sampah seperti ini dapat menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah terbatasnya lahan tempat pembuangan akhir (TPA) dan semakin tingginya

---

<sup>1</sup> Mary Selitung, Rombe Ryan. 2015. *Studi Pengelolaan Sampah Terpadu Di Tingkat Kelurahan Kota Makassar, Studi Kasus : Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang*. Makassar: Teknik Sipil Universitas Hasanudin. Hal. 2.

timbunan sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.<sup>2</sup> Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dampak terhadap kesehatan: tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia.
2. Dampak terhadap lingkungan: mati atau punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon.
3. Dampak terhadap sosial ekonomi: menyebabkan bau busuk, pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata secara bencana seperti banjir.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki indeks rawan banjir pada tingkat tinggi di Jawa Timur. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan yang rawan terkena bencana banjir memiliki ketinggian 0-7 meter di atas permukaan Laut.<sup>3</sup> Hal ini menyebabkan banjir di Kabupaten Lamongan terjadi hampir setiap tahun. Banjir pada umumnya disebabkan oleh dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir akibat aktivitas manusia. Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke aliran sungai menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai seringkali menjadi penyebab utama

---

<sup>2</sup> Alex S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal. 19.

<sup>3</sup> Chazienul Ulum. 2013. *Governance Dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Indonesia*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Hal. 8

terjadinya banjir. Hal ini dikarekan sungai sudah tidak mampu lagi menampung air hujan sehingga meluap ke daerah sekitar aliran sungai.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan sebanyak 1.118.193 jiwa.<sup>4</sup> Banyaknya jumlah penduduk menyebabkan adanya masalah timbulan sampah yang cukup tinggi dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Pada tahun 2009 jumlah timbunan sampah mencapai 1780,4 m<sup>3</sup>/hari sedangkan pada tahun 2010 naik menjadi 1830,5 m<sup>3</sup>/hari, sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 1896,45 m<sup>3</sup>/hari.<sup>5</sup> Di sisi lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat terbatas, pemerintah kabupaten Lamongan hanya memiliki lahan TPA sebesar 3,7 hektar.<sup>6</sup>

Permasalahan sampah yang dari hari ke hari semakin kompleks tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan peranan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada. Adanya otonomi daerah mempermudah pemerintah daerah untuk memiliki peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan di daerahnya. Pada dasarnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan cara

---

<sup>4</sup> *Data BPS Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lamongan tahun 2016*. diakses dari <https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2018/02/08/959/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-lamongan-2016>, pada 14 Maret 2018 Pukul 19.08 WIB.

<sup>5</sup> M.Azhar Anas, loc. cit

<sup>6</sup> <https://swa.co.id/swa/trends/management/perjalanan-kabupaten-lamongan-menuju-bebas-sampah> diakses pada 30 Maret 2018 pukul 18.30 WIB



mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat.<sup>7</sup>

Lamongan adalah salah satu kabupaten yang memperoleh penghargaan Adipura pada tahun 2011 dalam kategori kota kecil. Penghargaan Adipura adalah salah satu program yang dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota maupun provinsi untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (*good environmental governance*).<sup>8</sup> Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Lamongan lebih memperhatikan segala aspek pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya sistem pengelolaan lingkungan yang baik maka akan menghasilkan dampak yang baik pula bagi subyek yang melaksanakan pengelolaan tersebut. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tidak serta merta dapat diwujudkan dengan mudah, ada banyak sekali cara untuk mewujudkan hal tersebut.<sup>9</sup>

Dalam setiap pembuatan kebijakan mengenai lingkungan prinsip *environmental governance* perlu diterapkan. Seringkali konsep pembangunan yang tidak ditentukan berdasarkan nilai progresifnya. Untuk itu sangat perlu upaya untuk memfokuskan pada pencapaian konsep *good governance* sebagai prasyarat untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber daya alam dan

---

<sup>7</sup> Manik Muhayati. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pespektif Good Environmental Governance*, Malang: Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal.2

<sup>8</sup> *Adipura Bukan Sekadar Piala*, diakses dari [https://www.kompasiana.com/trims/adipura-bukan-sekadar-piala\\_592dd5f345afbded32205ff2](https://www.kompasiana.com/trims/adipura-bukan-sekadar-piala_592dd5f345afbded32205ff2), pada 14 Maret 2018 Pukul 15.08 WIB

<sup>9</sup> Citrawati Fitri Kartika, dkk. 2012. *Good Environmental Governance*. Malang: UB Press.

lingkungan. Dalam hal ini, *good governance* dapat ditempatkan sebagai basis bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan didasarkan pada hukum lingkungan. Realisasi dari konsep pemerintahan yang bijaksana “*good governance*” merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan.<sup>10</sup> Begitupula yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan, *good governance* merupakan landasan yang digunakan untuk mencapai misi dalam mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional.<sup>11</sup> Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Melihat hal tersebut, dapat diketahui apabila Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki misi untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Kabupaten Lamongan juga memiliki misi untuk mantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>12</sup> Misi ini bertujuan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip

---

<sup>10</sup> Nopyandari. 2011. *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jambi: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Jambi. Hal. 32

<sup>11</sup> RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020.

<sup>12</sup> *Ibid.*

pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lamongan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan mengeluarkan instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang program Lamongan *Green and Clean* (LGC). Inovasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan secara terukur, terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Paradigma lama sistem pengelolaan sampah harus dirubah. Sistem pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.<sup>13</sup>

Program Lamongan *Green and Clean* merupakan program yang fokus pada pengelolaan lingkungan yang meliputi kegiatan penghijauan lingkungan dan pengelolaan sampah yang berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*) melalui bank sampah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk merubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu program ini juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk

---

<sup>13</sup> M. Azhar Anas. 2017. *Studi Deskriptif tentang efektivitas program Lamongan Green and Clean (LGC) di Kabupaten Lamongan*, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Hal 2.

menciptakan lingkungan hidup yang bersih sehingga masyarakat dapat hidup sehat di tengah lingkungan yang sejuk dan asri.

Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan memiliki hak otonom sebagai pihak pembuat kebijakan (regulator) dan memiliki kewenangan membuat kebijakan Lamongan *Green and Clean* untuk mengelola lingkungan hidup. Pemerintah merupakan pihak yang paling tepat dalam mengambil inisiatif (insiator) agar program ini dapat menjadi gerakan masyarakat. Progam ini sebenarnya sudah diajukan oleh Bupati pada tahun 2010, namun kebijakan tersebut di mulai pada tahun 2011 setelah keluarnya instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang program Lamongan *Green and Clean*.

Untuk mengimplementasikan program ini pemerintah Kabupaten Lamongan tidak dapat melakukan sendiri. Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan kerjasama dengan swasta serta masyarakat Kabupaten Lamongan sebagai sasaran dari kebijakan ini. Dari pihak pemerintah program ini dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana bekerjasama dengan instansi lain untuk menjalan program ini diantaranya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kecamatan dan Kelurahan. Dari pihak non-pemerintan, pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Yayasan Unilever Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak-pihak terkait merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kebijakan yang berbasis lingkungan.

Program Lamongan *Green and Clean* merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mempertahankan gelar Adipura sebagai Kabupaten yang telah mampu mencapai Tata Praja Lingkungan (*good environmental governance*). Memperoleh penghargaan Adipura merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah daerah, oleh karena itu segala upaya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk memperoleh dan mempertahankannya. Karena sejatinya prinsip dari *environmental governance* memberikan perhatian kepada aktor dalam setiap tingkatan pemerintah, diantara para pejabat yang dipilih, ditunjuk dan diantara badan-badan non pemerintah, swasta, masyarakat tradisional, serta kekuasaan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan mengenai pengaturan sumber daya alam dan keuntungan yang berasal dari lingkungan.<sup>14</sup>

Fokus penelitian ini adalah tentang analisis kebijakan *Lamongan Green and Clean* yang berisi tentang faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan dalam prespektif *Environmental Governance*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memperoleh rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean* jika dilihat dari prespektif *Environmental Governance*?

---

<sup>14</sup> Anna Hamidah. 2016. *Enviromental Governance dan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau: Analisis Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Lamongan*. Malang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. hal. 15



2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean* jika dilihat dari perspektif *Environmental Governance*
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Akademis

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi studi ilmu politik khususnya tentang studi implementasi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan.
2. Menjadi referensi yang relevan dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi semua pihak yang berkenan dengan pengelolaan lingkungan, khususnya sampah. Dan juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar dalam mengambil kebijakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu aspek kehidupan politik yang memiliki dampak paling luas pada masyarakat. Secara garis besar, kebijakan publik adalah *output-output* dari proses politik. Kebijakan publik mencerminkan pengaruh pemerintah pada masyarakat, yaitu kemampuan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan atau perburukan-perburukan.<sup>1</sup> Ruang lingkup dari kebijakan publik sangat luas. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang seperti; politik, ekonomi, hukum, sosial, hukum, dan sebagainya. Jika dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal. sebagai contoh kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan gubernur, peraturan daerah atau provinsi, peraturan daerah/kota, dan keputusan bupati atau kota.

Solichin A. Wahab mengatakan bahwa dalam mengartikan istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan menjadi ajang perdebatan para ahli, maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin A. Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andrew Heywood. 2013. *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 621.

<sup>2</sup>Solichin Abdul Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal 40

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil yang dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intraorganisasi
9. Kebijakan publik meski tidak menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan apabila program tersebut tidak dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>3</sup> Proses kebijakan Van Meter dan Van Horn ini merupakan suatu performansi dari implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan

---

<sup>3</sup> Leo Agustino. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal. 139

beberapa variabel.<sup>4</sup> Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:<sup>5</sup>

1. Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan

Standar atau ukuran yang menjadi dasar serta tujuan dari kebijakan sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Tahapan yang paling krusial dalam proses analisis kebijakan adalah identifikasi indikator-indikator kinerja. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan dan kebijakan secara menyeluruh.<sup>6</sup>

2. Sumber-sumber kebijakan

Selain standar atau ukuran dan tujuan kebijakan, hal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya kebijakan. Sumber daya kebijakan tersebut meliputi sumber daya manusia, biaya, dan waktu.<sup>7</sup> Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor paling penting, karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan. Sedangkan biaya diperlukan untuk kelancaran proses kebijakan, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan membutuhkan biaya operasional. Waktu merupakan faktor pendukung dari keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 141-142

<sup>5</sup> Solichin Abdul Wahab, op. cit., hal. 165

<sup>6</sup> Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta:CAPS. Hal. 159

<sup>7</sup> Sutrisno Teguh. 2016. Skripsi: *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015*. Malang: Universitas Brawijaya Malang. Hal. 10



### 3. Ciri-ciri atau karakteristik badan atau instansi pelaksana

Karakteristik badan pelaksana menjadi bagian penting mengingat kinerja implementasi kebijakan akan banyak dipengaruhi oleh struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.<sup>8</sup>

### 4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn komunikasi antar organisasi terkait merupakan hal yang paling penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Selain itu implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Hal ini sangat diperlukan demi kelancaran pengimplementasian kebijakan.<sup>9</sup>

### 5. Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin dan merasa memiliki disiplin terhadap tugas masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup>

### 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena lingkungan yang kurang kondusif akan menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi

---

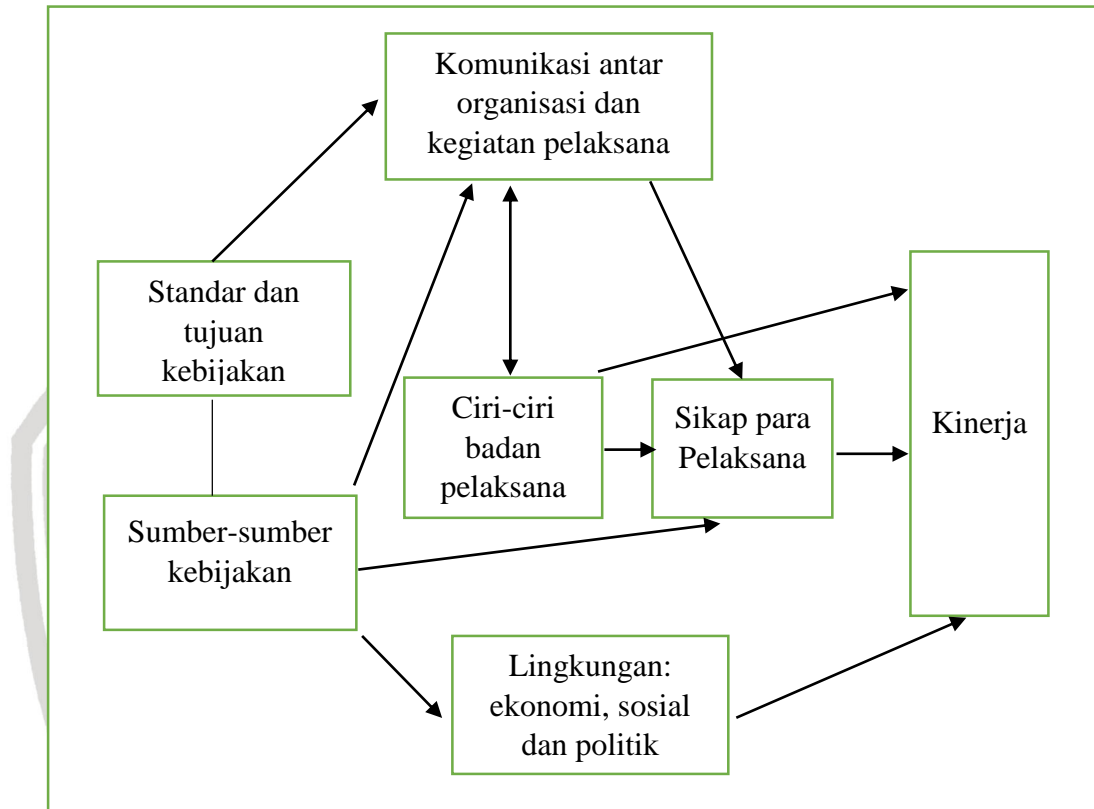
<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>9</sup> Budi Winarno, op. cit., hal 161-162

<sup>10</sup> Sutrisno Teguh, op. cit., hal. 11

kebijakan.<sup>11</sup> Secara skematis model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dapat dilihat pada bagan di bawah ini.<sup>12</sup>

**Bagan 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**



Sumber: Solichin A. Wahab 2015

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Yang menjadi pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi formal dan non-formal. Sedangkan komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan para

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>12</sup> Solichin A. Wahab., op. cit., hal 166

pelaksana mengantarkan kita pada pemahaman mengenai orientasi dari mereka yang mengoprasionalkan program di lapangan.<sup>13</sup> Berdasarkan variabel diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu variabel terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah peranan dari organisasi pelaksana kebijakan publik sebagai *implementor*. Sehingga untuk mengoptimalkan keberhasilan kebijakan publik yang telah dibuat, perlu meningkatkan dan mengefisienkan *implementornya*.

Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan harus dilakukan secara kolektif kolegial untuk publik, baik tindakan dari individu maupun kelompok yang kesemuanya diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik merupakan cara yang ditempuh agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang.<sup>15</sup> Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.<sup>16</sup>

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme

---

<sup>13</sup> Subarson. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 144.

<sup>14</sup> Van Meter dan Van Horn. 2014. *Public Policy:Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal. 163

<sup>15</sup> Hanif Sholahudin. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Implementasi*

*Kebijakan Kurikulum 2013*, artikel tentang kebijakan publik ini diakses dari web

[https://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK\\_Studi\\_Kasus\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Kurikulum\\_2013\\_](https://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK_Studi_Kasus_Implementasi_Kebijakan_Kurikulum_2013_) pada 13 Maret 2018 pukul 12.30 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid*.

yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan adalah wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan publik di Indonesia sebagian besar menganut model *top down*, yaitu suatu keputusan kebijakan yang dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah yang memiliki wewenang lebih tinggi ditujukan pada pemerintahan yang berada pada hirarki dibawahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan dalam upaya memperkuat efektivitas implementasi maka muncul beberapa pendekatan implementasi, yaitu: <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Solichin Abdul Wahab, op. cit., hal.234-246

1. Pendekatan struktural yang menyelaraskan rancangan kebijakan dengan rancangan organisasi pelaksana kebijakan agar keduanya dapat berjalan bersamaan.
2. Pendekatan prosedural dan manajerial, dalam pendekatan ini implementasi dipandang sebagai rangkaian masalah teknis kegiatan atau masalah manajerial dalam mengeksekusi sebuah kebijakan. Sedangkan prosedur-prosedur yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan penjadwalan, perencanaan dan pengawasan.
3. Pendekatan prilaku yang bertujuan untuk menciptakan suasana saling percaya antara para pemilik kewenangan dan masyarakat sasaran.
4. Pendekatan politik yang mengacu pada pola- pola kekuasaan dan pengaruhnya didalam lingkungan organisasi tersebut.

Implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean* ini termasuk dalam model implementasi *top down* yang berasal dari inisiasi dari Bupati Lamongan yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan. Program ini dituangkan dalam sebuah Instruksi Bupati yang kemudian dijadikan acuan oleh kecamatan-kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan program ini.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Environmental Governance**

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terjadinya pembangunan dapat



berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup yang ada. Dalam usaha ini, harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Untuk itu diperlukan adanya konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.<sup>18</sup> Permasalahan yang timbul kemudian adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi sampai sekarang ini tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi.<sup>20</sup> Diperlukan upaya untuk memfokuskan pada pencapaian konsep *good governance* sebagai prasyarat untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber daya alam dan lingkungan. Dalam hal ini, *good governance* dapat ditempatkan sebagai basis bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan didasarkan pada hukum lingkungan. Realisasi dari konsep pemerintahan yang bijaksana “*good governance*” merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Niniek Suparni. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 36

<sup>19</sup> Nopyandari, op. cit., Hal. 31

<sup>20</sup> Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat*, Jakarta: Suara Bebas hal. 15

<sup>21</sup> Nopyandari, op. cit., Hal. 32.

Pembangunan berkelanjutan seringkali dikaitkan dengan konsep *environmenral governance*. *Environmental governance* adalah paradigma baru di bidang lingkungan hidup yang menjadi bagian penting dari pencapaian *good governance*. Dengan adanya konsep *enviromental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai mainstream utama pembangunan di Indonesia yang sama-sama menjalankan aspek ekonomi dan sosial.

Menurut Meegave dan Tumushabe (1999) *environmental governance* sebagian besar dibangun berdasarkan dua konsep yaitu manajemen dan pemerintahan lingkungan. Konsep *environmental governance* dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan dari nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat madani dalam penggunaan, pengawasan dan manajemen dari lingkungan alam.<sup>22</sup> Nilai dan norma ini diekspresikan dalam suatu rantai kompleks yang terdiri dari peraturan, kebijakan dan institusi yang mengatur sebuah mekanisme organisasi dalam mengartikulasikan sasaran yang luas dan target perencanaan yang spesifik dari manajemen lingkungan.<sup>23</sup>

Purwo Santoso mendefinisikan *environmental governance* sebagai suatu corak penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk meminimalisir dampak

---

<sup>22</sup> Ahmad Hilmi Abdillah, 2013. *Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pertambangan dan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan lingkungan*. Diakses pada 15 Maret 2018 pukul 15.20 WIB dari [https://www.academia.edu/6636135/kesenjangan\\_implementation\\_kebijakan](https://www.academia.edu/6636135/kesenjangan_implementation_kebijakan)

<sup>23</sup> Manik Muhayati, Skripsi: “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Prespektif Good Environmental Governance*” (Malang: UB Malang, 2016), Hal. 11

negatif dari perilaku kolektif (kelembagaan) terhadap kondisi lingkungan.<sup>24</sup>

*Environmental governance* dirumuskan dan diselenggarakan untuk menekan resiko terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan.

Sistem pemerintahan yang ramah lingkungan (*good environmental governance*) paling tidak harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Pemberdayaan masyarakat
2. Transparansi
3. Desentralisasi yang demokratis
4. Adanya pengakuan mengenai keterbatasan terhadap daya dukung ekosistem dan keberlanjutan
5. Adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengetahuan masyarakat
6. Konsisten dan harmonisasi sumber daya alam
7. Kejelasan (*clarity*) masalah lingkungan hidup
8. Upaya penegakan hukum lingkungan ditentukan oleh tersedianya sanksi yang dapat menimbulkan efek jera (sanksi administratif, pidana, perdata) dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Melalui pemikiran *environmental governance*, diharapkan bisa dirumuskan pembaharuan penyelenggaraan kepentingan publik dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis. Baik buruknya penyelenggaraan pemerintah tidak hanya dilihat dari

---

<sup>24</sup> Purwo Santoso, 2003, *Kapasitas Pemerintah Daerah Mewujudkan Good Environmental Governance*, Renai: Jurnal Politik Lokal dan Sosial. Hal. 59

<sup>25</sup> Karawan A. Salikin. 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius. Hal: 101

kualitas hubungan negara dan rakyatnya, namun juga dari kualitas interaksi ekologisnya dan dari segi komitmennya untuk menjunjung tinggi kaidah-kaidah ekologis.<sup>26</sup>

### 2.2.2 Lamongan *Green and Clean*

Lamongan *Green and Clean* merupakan program hasil inisiatif dari Bupati Lamongan pada tahun 2011 yang berfokus pada lingkungan hidup. Program ini dibuat untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup terutama dalam hal pengolahan sampah domestik di wilayah kabupaten Lamongan.

Program Lamongan *Green and Clean* merupakan program yang berbasis masyarakat. Dalam menjalankan program ini Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Yayasan Unilever Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dari sampah serta bebas dari banjir dengan sistem pemberdayaan masyarakat.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran dari program Lamongan *Green and Clean*.

Tujuan dari Lamongan *Green and Clean* adalah:<sup>27</sup>

1. Menciptakan kampung yang hijau, bersih, sehat serta nyaman

---

<sup>26</sup> Purwo Santoso. 2012. *Transformasi Wacana Dan Praksis Politik Lingkungan*. hal. 10 diakses pada 25 Maret 2018 pukul 15.34 WIB dari [https://www.academia.edu/2205555/TRANSFORMASI\\_WACANA\\_DAN\\_PRAKSIS\\_POLITIK\\_LINGKUNGAN](https://www.academia.edu/2205555/TRANSFORMASI_WACANA_DAN_PRAKSIS_POLITIK_LINGKUNGAN)

<sup>27</sup> *Pedoman Lamongan Green and Clean*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

2. Mengkampanyekan kampung hijau dalam setiap momen kegiatan

Sedangkan sasaran dari Lamongan *Green and Clean* adalah:<sup>28</sup>

1. Terciptanya lingkungan bersih, indah dan nyaman serta menyehatkan
2. Terciptanya perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengemas program ini dalam bentuk perlombaan antar RT dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Agar masyarakat turut serta dalam program ini, pemerintah Kabupaten Lamongan akan memberikan hadiah berupa dana kepada RT yang menang untuk memperbaiki sarana dan prasana di RT tersebut. Pada awal pelaksanaannya, program LGC hanya di kategorikan menjadi satu yaitu Kategori Wilayah berkembang. Namun seiring dengan berjalannya waktu program LGC berkembang dan memiliki 6 kategori wilayah, yaitu:<sup>29</sup>

1. Wilayah Community Center (Percontohan)

Wilayah percontohan merupakan kategori dalam LGC yang sudah tidak lagi ikut dalam kompetisi. Namun wilayah ini hanya dijadikan percontohan bagi wilayah lain.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ajeng Dyah Irfanti, *Studi Opini Publik Program Lamongan Green And Clean Di Kabupaten Lamongan*, hal. 403. Diakses pada 11 April 2018 dari <http://journal.unair.ac.id/COMN@studi-opini-publik-program-lamongan-green-and-clean-di-kabupaten-lamongan-article-9325-media-137-category-8.html>



## 2. Wilayah Kencana

Wilayah kencana merupakan wilayah yang sudah mandiri dari segi pengelolaan lingkungan hidup. Wilayah ini merupakan wilayah yang sudah terbukti dapat mempertahankan kondisi lingkungan baik pada saat penilaian maupun tidak.

## 3. Wilayah Mandiri

Wilayah mandiri merupakan wilayah yang dinilai oleh pemerintah sebagai wilayah yang memiliki kemampuan mengelola lingkungan dengan baik dan dapat menghasilkan “produk” berupa tanaman obat maupun olahan sampah.

## 4. Wilayah Maju

Wilayah maju merupakan wilayah yang sudah baik dalam pengelolaan lingkungan. Wilayah ini sudah mampu menjalankan bank sampah dengan baik, serta memenuhi kriteria dari segi kelengkapan administrasi.

## 5. Wilayah Berkembang

Wilayah berkembang adalah wilayah berkembang yakni wilayah yang dapat mengelola lingkungannya. Namun, belum dapat menghasilkan produk dari pengelolaan lingkungan.

## 6. Wilayah Perintis

Wilayah perintis merupakan wilayah yang masih dalam pembenahan lingkungan.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun	Jenis Penelitian: Judul	Metode	Fokus Penelitian
1	Sutrisno Teguh Budianto, 2016	Skripsi: <i>Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015</i>	Kualitatif	Implementasi kebijakan alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan mengacu pada peraturan Bupati Lamongan No. 5 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa
2	M. Reza Dwi A, 2017	Skripsi: <i>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang (Studi Kasus di Bank Sampah Malang dan Dinas</i>	Kualitatif	Implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan sampah dan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayaan masyarakat dalam

		<i>Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)</i>		pengelolaan sampah
3	Nur Faisah dan Andi Luhur Prianto, 2015	Jurnal Ilmiah: <i>Good Environmental Governance</i> (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan di Kota Makasar	Kualitatif	Tata kelola ruang terbuka hijau Taman Macan di Kota Makasar dalam prespektif <i>good environmental governance</i> yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makasar.
4	Ajeng Dyah Irfanti, 2014	Jurnal Ilmiah: Studi Opini Publik Program Lamongan <i>Green and Clean</i> di Kabupaten Lamongan	Kualitatif	Penelitian ini berfokus pada pendapat masyarakat baik pelaku maupun non pelaku dalam pelaksanaan program Lamongan <i>Green and Clean</i> .

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu di atas dapat diketahui terdapat perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yakni sebagai berikut:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Teguh Budianto pembedanya terdapat dari pembahasan yang diambil, dimana skripsi ini membahas mengenai alokasi dana desa dan penelitian ini membahas mengenai kebijakan *Lamongan Green and Clean*. Sedangkan persamaan yang dimiliki terletak pada objek dan juga sama-sama membahas mengenai kebijakan publik.

Kedua pada penelitian M. Reza Dwi A pembedanya terdapat pada fokus pembahasan yang diambil. Pada skripsi M. Reza Dwi A membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan dengan memberdayakan masyarakat Kota Malang melalui bank sampah. Sedangkan persamaannya adalah kedua penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan lingkungan hidup. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas mengenai bank sampah yang menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan *Lamongan Green And Clean*.

Ketiga pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Faisah dan Andi Luhur Prianto pembedanya terdapat pada fokus penelitian, dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai tata kelola ruang terbuka hijau dalam hal ini yang dijadikan studi kasus adalah Taman Macan di Kota Makasar. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan prespektif *Environmental Governance*.

Keempat pada penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Dyah Irfanti pembedanya terdapat pada fokus penelitian, dalam penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas program Lamongan *Green and Clean*.

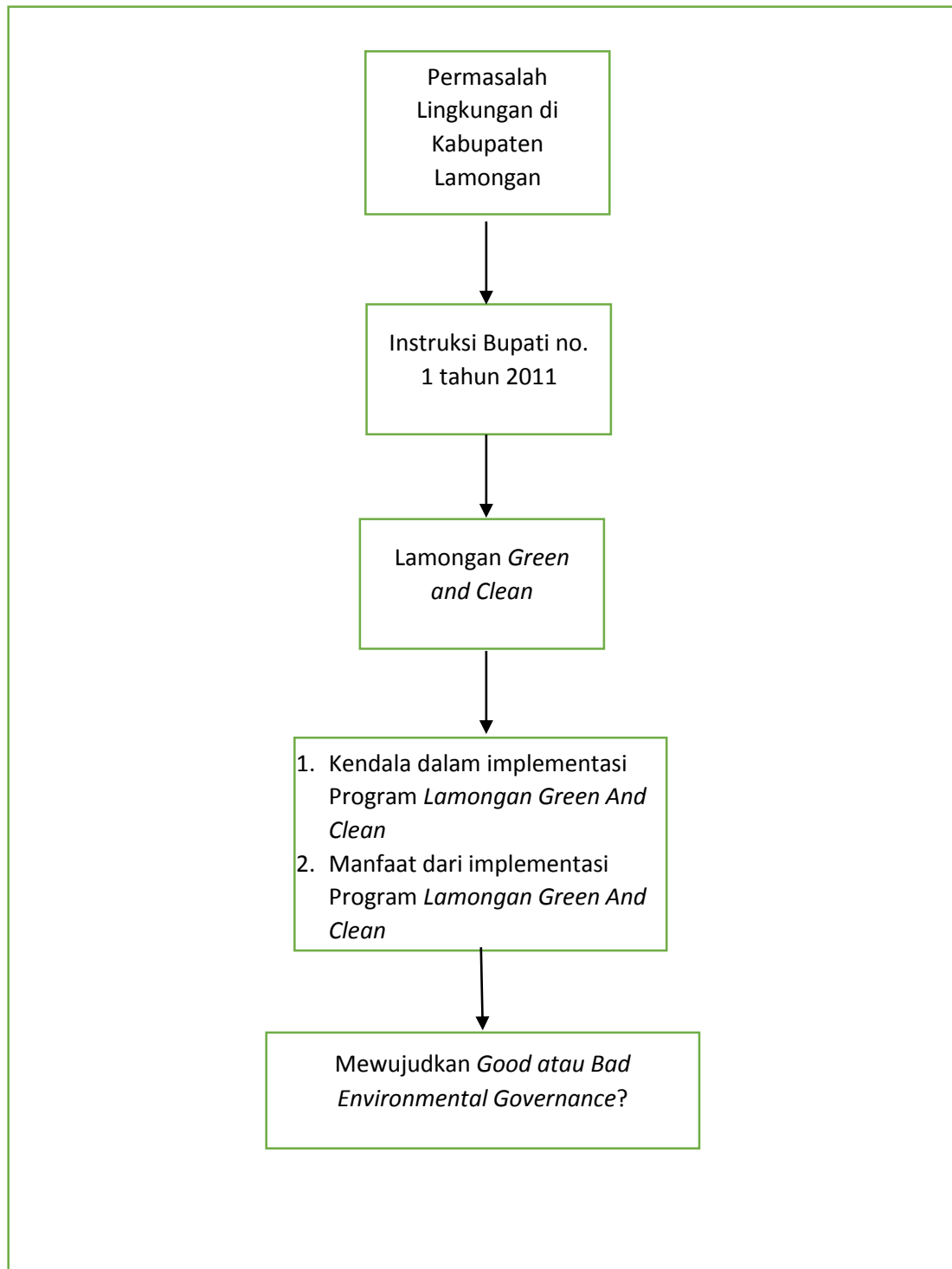
## 2.4 Kerangka Pemikiran dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, kerangka berfikir peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang membuat suatu kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 yang disebut dengan *Lamongan Green And Clean*. Program *Lamongan Green And Clean* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat di seluruh Kabupaten Lamongan. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaatnya baik dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik, karena penelitian ini berfokus pada pengimplementasian program *Lamongan Green And Clean*.

Peneliti juga menggunakan landasan konseptual *environmental governance*. Karena program ini ditujukan untuk pengelolaan lingkungan hidup serta melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaannya. Untuk memudahkan dalam melihat pola pikir peneliti dibawah ini adalah bagan alur kerangka berpikir penelitian.



## Bagan 2.2 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti, 2018

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian dideskripsikan oleh Uma Sekaran sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, dan ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.<sup>1</sup> Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Lamongan *Green And Clean* dalam Prespektif *Environmental Governance*” ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Lareau dan Shultz dalam David Marsh dan Gerry Stoker mendeskripsikan metode kualitatif sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai berbagai macam teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dan dalam

---

<sup>1</sup> J.R. Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. hal. 5

<sup>2</sup> Diakses dari [http://repository.upi.edu/406/6/S\\_PKN\\_0907327\\_CHAPTER3.pdf](http://repository.upi.edu/406/6/S_PKN_0907327_CHAPTER3.pdf) pada 30 Maret 2018 pukul 00.54 WIB

konteks.<sup>3</sup> Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti maka dalam penelitiannya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan atau stimulan.<sup>4</sup>

Dalam penyajian data penelitian ini menggunakan pola deskriptif. Pola ini menurut Best adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif-deskriptif yaitu menggambarkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menghubungkan atau membandingkan realitas untuk menyelesaikan masalah.<sup>6</sup>

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan adanya fokus penelitian, peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian dibuat agar cara berfikir peneliti lebih terarah dan lebih sistematis. Hal ini dilakukan agar pembahasan peneliti tidak menyimpang dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan di awal penelitian ini. Dari penjelasan sebelumnya fokus pada penelitian ini adalah tentang bagaimana proses implementasi dari program Lamongan *Green and Clean* jika dilihat dari prespektif

---

<sup>3</sup> David Marsh, Gerry Stoker. 2012. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media. hal. 239

<sup>4</sup> Sugiyono. 2014. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hal. 9

<sup>5</sup> Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi, Dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, hal. 157

<sup>6</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 54

*Environmental Governance*. Apakah dalam pelaksanaan program ini dapat mewujudkan *Good* atau *Bad Environmental Governance*.

### 3.3 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang akan dipakai peneliti untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan tema dan judul penelitian. Lokasi penelitian ditujukan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lamongan. Objek penelitian dilakukan kepada beberapa instansi yang terkait yaitu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selaku pelaksana program, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lamongan, serta masyarakat Kabupaten Lamongan yang melaksanakan kebijakan Lamongan *Green and Clean*.

### 3.4 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan Lamongan *Green and Clean* dalam perspektif *Environmental Governance* ini, peneliti memilih informan secara *purposive*. Menurut Sugiyono teknik *purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu.<sup>7</sup> Dengan menggunakan metode *purposive* dalam menentukan informan, informan yang akan dipilih merupakan informan yang memiliki informasi dan memahami permasalahan yang sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiyono, op. cit., Hal. 85

<sup>8</sup> *Ibid.*

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan. Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi tiga macam, yaitu: <sup>9</sup>

- a) Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
- b) Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
- c) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

**Tabel 2.2 Daftar Informan**

No	Nama	Kriteria	Jenis Informan
1.	Hamim Thohari, ST., M.Kes.	Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan	Informan Kunci
2.	Puji Nawatiningsih, S.P.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Informan Kunci
3.	Winarti	Masyarakat	Informan Utama
4.	Kusnaini, S.E., M.M.	Kepala Seksi Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat	Informan Tambahan

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 172



		dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan	
5.	Darno, S.H	Kepala Seksi Persampahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan	Informan Tambahan

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi<sup>10</sup>

Observasi merupakan salah cara untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi dan instansi terkait permasalahan yang telah dipilih. Manfaat observasi adalah peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga akan diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Adapun jenis observasi ada tiga macam yaitu :

- a. Observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau orang yang digunakan sebagai informan. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut serta melakukan apa yang dikerjakan oleh informan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 145

- b. Observasi terus terang atau tersamar, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada informan bahwasanya dia sedang melakukan penelitian. Sehingga informan mengetahui segala aktivitas peneliti dari awal sampai akhir. Tetapi dalam suatu penelitian tidak selamanya harus terus terang, namun juga bisa dilakukan dengan tersamar. Hal ini dilakukan untuk menghindari kalau data yang diperlukan bersifat rahasia.
- c. Observasi tidak terstruktur, yaitu hal ini dilakukan jikalau fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan terus berkembang setelah peneliti melakukan penelitian ke lapangan.

## 2. Wawancara<sup>11</sup>

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi struktur. Dengan menggunakan wawancara semi struktur peneliti lebih bebas jika dibandingkan wawancara yang terstruktur. Jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, selain itu informan diminta untuk berpendapat dan mengeluarkan ide-idenya. Sehingga dalam melakukan penelitian seorang peneliti harus mendengarkan dengan seksama dan teliti serta mencatat apa saja yang dikemukakan oleh informan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 137

### 3. Studi Kepustakaan<sup>12</sup>

Studi kepustakaan dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan informasi tambahan yang terkait pada penelitian ini. Informasi tersebut diperoleh dari sumber-sumber seperti buku-buku, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan.

### 4. Studi Dokumentasi<sup>13</sup>

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi merupakan pelengkap dari sumber data dari hasil wawancara dan observasi dalam sebuah penelitian kualitatif. Dokumentasi biasanya berupa gambar yang didapatkan selama peneliti melakukan penelitian

## 3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah :

### 1. Pedoman Wawancara

Salah satu kunci dari keberhasilan penelitian terletak pada di proses wawancara. Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat sebagai acuan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara

---

<sup>12</sup> Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan. Kompetensi dan Prakteknya*, Yogyakarta: PT Bumi Aksara, hal.167

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 167

dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang terstruktur kepada responden. Sehingga untuk dapat berhasil dalam melakukan wawancara, seorang *interviewer* harus mengetahui dan paham tujuan dan maksud penelitian, menguasai konsep, serta materi dan pertanyaan yang ingin ditanyakan.

## 2. Pedoman Dokumentasi

Dalam melakukan pedoman dokumentasi, peneliti mengkaji data-data tertulis dari buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. pada dasarnya pedoman dokumentasi terdiri dari garis besar data yang dapat menunjang penelitian.

## 3. Buku Catatan

Buku catatan sangat penting dalam melakukan penelitian. Buku catatan digunakan oleh peneliti untuk mencatat semua temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian

## 4. Perekam Suara

Perekam suara sangat penting dalam melakukan penelitian. Perekam suara digunakan untuk merekam semua percakapan yang dilakukan oleh peneliti dan informan saat melakukan wawancara.

### 3.7 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data adalah data-data yang memiliki keterkaitan dengan sumber penyedia informasi yang menjadi fokus dalam kajian data. Dalam

penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Berikut ini adalah penjelasannya:<sup>14</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari hasil wawancara dengan informan (tanpa melalui perantara). Data primer bisa berupa opini atau pendapat individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap sebuah benda (fisik), dan kejadian atau kegiatan. Sumber data yang dihasilkan merupakan catatan penting yang di temukan dari hasil pengamatan lapangan dan juga informasi yang diberikan kepada informan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, serta tidak memiliki hubungan langsung dengan informan yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder bisa berupa bukti dokumen, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (*data documenter*) yang dipublikasikan dari berbagai pihak yang mendukung penelitian seperti produk kebijakan dan lain sebagainya.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan metode penelitian kualitatif. Dalam suatu penelitian kualitatif proses analisis data sudah dilakukan sebelum peneliti

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Op.cit*, hal.279



turun lapangan sampai pada setelah turun lapangan. Proses pengolahan data yang akan dilakukan dengan analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman terdapat 3 tahap analisis data yaitu:<sup>15</sup>

1. Reduksi Data, merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Biasanya masih berupa catatan-catatan kasar yang kemudian data tersebut ditelusuri kembali dan dipilih menjadi data-data terkait implementasi kebijakan lingkungan yang masuk dalam penelitian
2. Penyajian Data, merupakan proses penyajian data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian atau teks naratif. Data-data yang telah disederhanakan dan dipilih kemudian dalam penelitian kualitatif ini menjadi penting untuk disajikan dengan bentuk uraian kata dan kalimat.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan proses terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang telah disederhanakan. Verifikasi dilakukan sebagai tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, ide-ide baru yang melintas dipikiran atau dilakukannya peninjauan kembali hasil penelitian sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari alur penelitian.

### 3.9 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Pemanfaatan sesuatu yang lain digunakan untuk keperluan

---

<sup>15</sup> Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal. 246

pengecekan dan perbandingan terhadap suatu data. Dengan kata lain, peneliti memperoleh data tidak hanya berasal dari satu sumber saja.<sup>16</sup> Peneliti menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran data atau informasi tersebut. Triangulasi data dibagi menjadi tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.



---

<sup>16</sup> Moelong, J. Lexy, 2005, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 330

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah 1.812,80 Km<sup>2</sup> atau setara dengan 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur.<sup>1</sup> Wilayah administratif Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 kecamatan, 12 kelurahan dan 476 desa.

**Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lamongan**



Sumber: Situs Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2018

<sup>1</sup> Situs Pemerintah Kabupaten Lamongan, diakses dari <https://lamongankab.go.id/> pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB

Batas-batas wilayah Kabupaten Lamongan, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0-25 m dengan luas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25-100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m dari permukaan air laut.<sup>2</sup> Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:<sup>3</sup>

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Kabupaten Lamongan tergolong memiliki iklim tropis dengan tipe iklim C dan curah hujan rata-rata 3916,4 m<sup>3</sup> per tahun. Musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan April.<sup>4</sup> Sedangkan musim kemaraunya terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Diantara pergantian kedua musim tersebut terdapat musim peralihan atau musim pancaroba yang terjadi pada bulan April atau Mei dan di bulan Oktober atau November.

Secara demografi berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten yang dilakukan pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan sebanyak 1.360.987 jiwa.<sup>5</sup> Berikut ini merupakan hasil sensus penduduk Kabupaten Lamongan yang di lakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Pada tahun 2010 dan 2017.

**Tabel 4.1. Luas Wilayah (Km2) dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Hasil Sensus Penduduk 2010 dan 2017.**

NO	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	
			2010	2017
1.	Sukorame	4.147	20.384	20.562
2.	Bluluk	3.415	22.031	21.831
3.	Ngimbang	11.433	45.363	46.313
4.	Sambeng	19.544	48.041	51.406
5.	Mantup	9.307	43.826	45.204
6.	Kembangbahu	6.384	47.061	49.091
7.	Sugio	9.129	54.179	61.495
8.	Kedungpring	8.443	48.825	59.778

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, diakses dari <https://lamongankab.bps.go.id/> pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 15.30 WIB



9	Modo	7.780	44.80	49.433
10.	Babat	6.295	75.342	88.615
11.	Pucuk	4.468	36.785	49.979
12.	Sukodadi	5.232	51.514	57.148
13.	Lamongan	4.038	69.026	68.173
14.	Tikung	5.299	43.858	44.479
15.	Sarirejo	4.739	22.803	25.058
16.	Deket	5.005	42.844	44.193
17.	Glagah	4.052	34.768	43.180
18.	Karangbinangun	5.288	32.826	41.080
19.	Turi	5.869	47.877	54.549
20.	Kalitengah	4.335	29.650	35.931
21.	Karanggenang	5.132	34.424	45.554
22.	Sekaran	4.965	30.569	49.142
23.	Maduran	3.015	23.261	37.283
24.	Laren	9.600	33.054	51.801
25.	Solokuro	10.102	41.320	48.345
26.	Paciran	4.789	97.333	97.208
27.	Brondong	7.459	66.709	74.153
JUMLAH		181.280	1.118.193	1.360.987

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan memiliki visi yaitu “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Untuk mewujudkan visi tersebut dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ditempuh melalui lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

#### **4.2 Gambaran Umum Kebijakan Lamongan *Green and Clean***

Adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan yang tidak disertai dengan pertumbuhan wilayah, mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada kondisi lingkungan. Banyaknya jumlah penduduk mempengaruhi jumlah produksi sampah. Terkait sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan saat ini dapat dikatakan masih cukup berjalan dengan baik. Karena sebagian besar masyarakat terutama

masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem konvensional yaitu menimbun atau membakar. Sebaliknya, untuk masyarakat perkotaan sudah menggunakan sistem pengolahan sampah secara komunal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Lamongan pada dasarnya memiliki 4 TPA. Akan tetapi hanya 3 yang masih beroperasi hingga saat ini, serta hanya ada 1 yang masih beroperasi dengan optimal. 4 TPA tersebut berada di Kecamatan Babat, Solokuro, Tikung dan Paciran. TPA yang masih beroperasi secara optimal adalah TPA Tambakrigadung di Kecamatan Tikung. Berikut ini adalah data timbulan sampah di TPA Tambakrigadung, Kecamatan Tikung dari bulan Januari 2015 hingga September 2016.

**Tabel 4.2 Data Timbulan Sampah di TPA Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan**

No	Bulan	Timbulan Sampah di TPA (Ton)	Rata-Rata Timbulan Sampah Harian (Ton)
1.	Januari 2015	764,46	24,66
2.	Februari 2015	748,16	26,72
3	Maret 2015	752,37	24,27
4	April 2015	670,20	22,34
5	Mei 2015	728,81	23,51
6.	Juni 2015	731,40	24,38
7.	Juli 2015	675,80	21,80
8.	Agustus 2015	640,46	20,66
9.	September 2015	690,90	23,03
10.	Oktober 2015	748,34	24,14

11.	November 2015	738,00	24,60
12.	Desember 2015	741,21	23,91
13.	Januari 2016	746,17	24,07
14.	Februari 2016	763,57	26,33
15.	Maret 2016	689,75	22,25
16.	April 2016	614,40	20,48
17.	Mei 2016	668,05	21,55
18.	Juni 2016	670,50	22,35
19.	Juli 2016	562,65	18,15
20.	Agustus 2016	587,14	18,94
21.	September 2016	633,30	21,11

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan

Berdasarkan permasalahan diatas pemerintah kabupaten Lamongan mengeluarkan kebijakan lingkungan melalui Intruksi Bupati No. 1 Tahun 2011 tentang Lamongan *Green and Clean*. Lamongan *Green and Clean* adalah program lingkungan yang berbasis masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih bebas sampah di seluruh lingkungan yang ada di Kabupaten Lamongan dengan sistem pemberdayaan masyarakat.

Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 melalui Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2011, dan direncanakan berakhir pada tahun 2020. Pada awal pelaksanaannya, program ini dikemas dalam bentuk perlombaan. Hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat Kabupaten Lamongan untuk berpartisipasi dalam mengikuti program ini.



Setiap tahunnya Lamongan *Green and Clean* memiliki tema yang berbeda. Pada awal tahun pelaksanaannya yaitu tahun 2011 Lamongan *Green and Clean* mengangkat tema “Hijau dan Bersih”. Tahun 2012 tema yang diangkat adalah “*Waste Lover*” (Pencinta Sampah). Sedangkan tahun 2013 tema yang diangkat adalah “Menuju Lamongan Merdeka dari Sampah Melalui Bank Sampah”. Pada tahun 2013 setiap peserta Lamongan *Green and Clean* wajib memiliki Bank Sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk tahun 2014 tema yang diangkat adalah “Lamongan Warna Warni Bunga dan Merdeka Dari Sampah”. Sama dengan tahun 2013 pada tahun 2014 setiap peserta juga diwajibkan untuk memiliki bank sampah di setiap RTnya, namun pada tahun ini sisi estetika lebih diperhatikan. Yaitu dengan mewajibkan setiap rumah di lingkungan RT peserta Lamongan *Green and Clean* memiliki tanaman yang berbunga. Di tahun 2015 tema yang diangkat adalah “Lamongan *Green City*”. Tahun 2016 tema yang diangkat adalah “Semakin Merdeka Sampah dengan 1000 Bank Sampah”. Sedangkan pada tahun 2017 tema yang diangkat adalah “Tercapainya 1000 Bank Sampah Menuju Lamongan Bebas Sampah Tahun 2020”. Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, Lamongan *Green and Clean* di tahun 2017 berubah menjadi Lamongan *Green and Clean Plus*. Dan pada pelaksanaan tahun 2018 mengambil tema “Kelola Sampah Menuju Lamongan *Zero Waste*”.<sup>6</sup> Selain menjaga lingkungan tetap hijau, indah dan teduh pada pelaksanaan Lamongan *Green and Clean Plus* ini setiap warga harus memiliki tanaman hortikultura.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Puji, DLH Kabupaten Lamongan pada 13 Juli 2018

#### 4.1.1 Sasaran Kebijakan Lamongan *Green and Clean*

Tingginya populasi dan kepadatan penduduk perkotaan menjadi penyebab utama adanya permasalahan lingkungan. Banyaknya jumlah penduduk menjadi suatu ancaman terbesar bagi kelestarian lingkungan hidup. Setiap penduduk memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk mampu bertahan hidup. Namun di sisi lain setiap individu juga menghasilkan limbah dalam berbagai macam bentuk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di perkotaan telah melebihi kemampuan daya dukung lingkungan untuk meregenerasi sendiri. Hal ini berakibat pada semakin menurunnya kualitas hidup manusia. Sistem pengelolaan sampah yang selama ini menggunakan paradigma lama yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir perlu dirubah. Permasalahan sampah di perkotaan semakin hari semakin kompleks, hal ini dikarenakan jenis sampah yang semakin beragam dan terbatasnya tempat yang digunakan sebagai tempat pembuangan akhir.

Sistem pengelolaan sampah pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pasal 22 UU No. 18 Tahun 2008 mengatakan bahwa penanganan sampah yang harus dilaksanakan pemerintah kota atau kabupaten adalah:<sup>7</sup>

- a. Pemilahan dalam pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan atau sifat sampah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

- b. Pengumpulan dalam bentuk pengembalian dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau pengelolaan sampah terpadu
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
- d. Pengelolaan sampah dalam bentuk merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa sistem pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan dengan menggunakan paradigma lama yaitu sampah hanya ditimbun dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, harus dimanfaatkan nilai gunanya. Memanfaatkan nilai guna sampah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat. Adanya Undang-Undang tersebut pemerintah Kabupaten Lamongan membuat kebijakan mengenai penghijauan lingkungan demi menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lamongan.

### 1.1.2 Tujuan Kebijakan Lamongan *Green and Clean*

Kebijakan Publik oleh James Anderson didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Begitupula dengan diadakannya program Lamongan *Green and Clean*, pemerintah Kabupaten Lamongan menginginkan masyarakat Kabupaten Lamongan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kebersihan. Selain itu tujuan dari dilaksanakannya Lamongan *Green and Clean* juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengatasi permasalahan lingkungan termasuk permasalahan sampah.

Menurut Kepala Seksi Peubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan Bapak Hamim Thohari, ST, M.Kes, mengatakan bahwa tujuan diadakannya LGC yaitu:

*“selama ini pemahaman masyarakat menganggap bahwa LGC itu harus mempercantik lingkungan dengan tanaman hias dalam pot, memiliki IPAL itu tidak harus dilakukan secara seketika dan membebani masyarakat. Hal-hal semacam itu dapat dilakukan secara bertahap. Tujuan utama dari LGC menjadikan gaya hidup masyarakat kabupaten Lamongan untuk menjadi bersih dan sehat. Mulai tahun kemarin kita tanamkan prinsip kepada masyarakat bawasanya ini bukan lomba. Jadi pemenang ya itukan, istilahnya bukan lomba.”<sup>8</sup>*

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari diadakannya program Lamongan *Green And Clean* adalah untuk merubah gaya

---

<sup>8</sup> Wawancara Pak Hamim Thohari, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan, pada tanggal 28 Juni 2018

hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan mengharapkan dengan dilaksanakannya program ini masyarakat dapat turut berpartisipasi dan menjaga kebersihan lingkungannya. Dengan demikian maka kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.







## BAB V

### PEMBAHASAN DAN HASIL

#### 5.1 Implementasi Kebijakan Lamongan *Green and Clean*

Pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* sudah dimulai sejak kebijakan ini dikeluarkan yaitu pada tahun 2011 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan program ini bersifat instruksi yang diberikan oleh Bupati Lamongan sehingga apabila masa jabatannya telah habis maka program ini bisa tidak dilaksanakan. Program *Green and Clean* dilaksanakan setiap tahunnya dengan menggunakan tema yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tetap semangat dan berinovasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat. Berdasarkan pedoman pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*, setiap RT yang ada di kabupaten Lamongan bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* dengan dasar kesepakatan dari masyarakat (termasuk tokoh masyarakat) dan juga lurah atau kepala lingkungan setempat. Dalam pelaksanaan Lamongan *Green and Clean* terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:<sup>1</sup>

1. Melakukan audiensi dengan Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan setelah itu melakukan sosialisasi program dengan camat , kades ketua RT setempat. Lalu dilanjutkan dengan pengambilan formulir peserta LGC

---

<sup>1</sup> Pedoman Pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

2. Pengambilan formulir peserta kepada Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
3. Pelatihan fasilitator wilayah perintis, berkembang, maju dan mandiri.
4. Pelaksanaan penjurian
5. Apresiasi Lamongan Green and Clean serta pengumuman pemenang.

Partisipasi dari masyarakat Kabupaten Lamongan merupakan point penting dan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini. Selain adanya partisipasi dari masyarakat, pada tahapan awal program ini membutuhkan peranan dari kader lingkungan yang membantu terlaksananya program. Kader lingkungan dipilih sendiri oleh masyarakat berdasarkan kemampuannya. Kader lingkungan memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Motivator setiap kader lingkungan harus mampu memberikan motivasi, pencerahan serta merubah perspektif masyarakat tentang pentingnya mengatasi permasalahan lingkungan.
- b. Memberi edukasi selain sebagai motivator, kader juga memiliki peran untuk memberikan informasi mengenai isu-isu lingkungan dan permasalahan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat.
- c. Katalisator yaitu, kader berperan dan ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa peranan dari kader lingkungan sangatlah penting. Pembentukan kader lingkungan merupakan proses awal dari

---

<sup>2</sup> Ibid.

pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*. Kader lingkungan harus berkomitmen untuk menjalankan teknis pelaksanaan di masing-masing RT sesuai dengan panduan program Lamongan *Green and Clean* sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Musyawarah dan membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung program Lamongan *Green and Clean*. Musyawarah ini diadakan oleh Ketua RT, para kader lingkungan serta masyarakat untuk berkomitmen menjaga lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal.
2. Membentuk kelompok kerja Lamongan *Green and Clean* yang ditetapkan dengan surat keterangan Ketua RT dan lurah. Fungsi dari kelompok kerja disini sebagai wadah masyarakat untuk bertukar ide dan pemikiran mengenai pelaksanaan program.
3. Membuat aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat, yang diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Hak masyarakat<sup>4</sup>

Masyarakat memiliki hak untuk menikmati udara bersih dan segar, lingkungan yang indah yang indah dan nyaman. Dengan menjaga dan mengelola lingkungan, maka kualitas hidup masyarakat akan jauh lebih baik.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

b. Kewajiban masyarakat<sup>5</sup>

1. Masyarakat wajib melakukan pembersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya setiap pagi dan sore hari. Kegiatan ini dilakukan setiap hari, guna menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan kebersihan lingkungan
2. Masyarakat wajib memiliki tanaman dalam pot minimal 5 sampai 10 tanaman disetiap rumah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penghijauan dan pengurangan polusi udara.
3. Masyarakat wajib memiliki tempat sampah yang terdiri atas tempat sampah organik dan anorganik.
4. Masyarakat wajib untuk memelihara tanaman dengan melakukan penyiraman. Penyiraman tanaman berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu hal ini juga dapat menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap keberadaan lingkungan hidup disekitarnya.
5. Masyarakat wajib untuk berpartisipasi dari segi pendanaan sesuai dengan ketentuan dalam musyawarah yang ditetapkan masing-masing RT. Dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan masyarakat dituntut untuk mandiri. Dengan kata lain penyediaan tanaman, dan tempat sampah menggunakan biaya masing-masing. Apabila kondisi perekonomian masyarakat di tempat tersebut tidak memadai, maka masyarakat harus memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan alternatif.
6. Masyarakat wajib melaksanakan agenda kelompok kerja. Adapun program dari kelompok kerja adalah jadwal kebersihan lingkungan, jadwal kerja bakti dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*



pertemuan rutin (panduan pelaksanaan Lamongan *Green and Clean*). Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengevaluasi setiap pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

7. Masyarakat wajib melaksanakan penataan kampung dengan cara kerja bakti. Biasanya kegiatan kerja bakti dilakukan untuk menata pot tanaman, menata tempat sampah, pengecatan tempat, pengecatan pot dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan lingkungan tersebut.

Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan keberhasilan suatu wilayah yang berhak mendapatkan predikat lingkungan yang terbaik dalam hal kebersihan, asri dan hijau menurut pedoman Lamongan *Green and Clean* yaitu:<sup>6</sup>

a. Untuk Wilayah Non Komplek

1. Minimal memiliki 50 rumah yang melakukan pengelolaan sampah
2. Harus memiliki ciri pengelolaan sampah yang menggambarkan program
3. Memiliki inovasi dalam mengelola sampah di wilayahnya
4. Mengelola sampah anorganik menjadi barang yang berguna
5. Memiliki bank sampah secara sistem atau apabila kondisi wilayah memungkinkan memiliki bank sampah secara fisik

b. Untuk Wilayah Komplek<sup>7</sup>

1. Memiliki minimal 80 rumah yang sudah melakukan pengelolaan sampah
2. Memiliki inovasi dalam mengelola sampah di wilayahnya
3. Mengelola sampah anorganik menjadi barang yang berguna

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid.*

4. Memiliki bank sampah secara sistem atau apabila kondisi wilayah memungkinkan memiliki bank sampah secara fisik

## 5.2 Analisis Isi Kebijakan Lamongan *Green and Clean*

### 5.2.1 Standar Atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* dibuat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari program ini. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tujuan dari diadakannya program Lamongan *Green and Clean* sendiri adalah untuk merubah pola berfikir masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Pada awal pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* di tahun 2011, program ini hanya memiliki satu kategori wilayah yaitu wilayah berkembang. Kemudian ditahun selanjutnya kategori wilayah perintis dan maju di tambahkan. Dalam pelaksanaan program Lamongan *green and clean* setiap pemenang akan di promosikan ke kategori diatasnya. Seperti yang dikatakan Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan Bapak Hamim Thohari, ST, M.Kes dalam wawancara:

*“jadi sistemnya itu promosi. Seperti sepak bola itukan ada sistem promosi ada degradasi. Tapi kalau sini menggunakan sistem promosi yang artinya, kalau pada saat daftar RTnya kategori paling bawah yaitu perintis. Ketika diadakan evaluasi adminitrasi dan lapangan kemudian memenuhi syarat, RT itu nanti layak promosi. Misalnya jika dalam satu kategori ditetapkan ada 50 RT terbaik, maka 50 RT yang memiliki nilai tertinggi dalam kategori tersebut akan dipromosikan ke kategori di atasnya.”<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> Hamim Thohari., Op.cit.

Di tahun 2016 kategori wilayah ditambah lagi yaitu kencana dan *community center*. Wilayah yang sudah masuk dalam kategori *community centre* sudah tidak lagi mengikuti perlombaan Lamongan *Green and Clean*. Akan tetapi wilayah tersebut dijadikan percontohan bagi wilayah-wilayah lainnya. Adanya penambahan kategori wilayah bertujuan agar masyarakat tetap semangat dalam melaksanakan program ini. Hal tersebut dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar tetap konsisten dalam menjaga lingkungan. Adapun hasil wawancara dengan bapak Hamim Thohari:

*“di wilayah community center inovasi, kelengkapan, pengelolaan sampahnya lebih mandiri. Harapan kita ini untuk wilayah yang sudah masuk dalam kategori mandiri, masyarakat tetap dapat konsisten dalam menjaga lingkungannya baik pada saat penilaian ataupun tidak. Tapi karena pada kenyataannya di lapangan masyarakat yang masuk dalam kategori mandiri belum mandiri makanya kita tambah kategori yaitu kencana dan percontohan. Tujuannya agar masyarakat terus termotivasi untuk menjaga lingkungan”<sup>9</sup>*

Dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*, ada beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Lamongan. Indikator tersebut menjadi standar penilaian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini adalah tabel indikator penilaian program Lamongan *Green and Clean*

**Tabel 5.1 Indikator Pelaksanaan Lamongan *Green and Clean***

Indikator	Kriteria Pelaksanaan Program				
	RT Perintis	RT Berkembang	RT Maju	RT Mandiri	RT Kencana
Kebersihan	30%	35%	35%	35%	30%
Penghijauan	35%	30%	30%	30%	20%

<sup>9</sup> Ibid.

Kesehatan	10%	10%	10%	10%	10%
Bank Sampah	15%	15%	15%	15%	20%
Administrasi Lingkungan	10%	10%	10%	10%	10%
Ikon dan Replika Wilayah	-	-	-	-	10%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Dari tabel indikator tersebut dapat dilihat setiap kategori memiliki prosentase yang berbeda. Dalam beberapa kategori meskipun persentasenya sama tetapi ada beberapa kriteria yang berbeda. Adapun beberapa penjelasan dari setiap indikator memiliki klasifikasi di dalamnya.

a. Kebersihan

Kebersihan lingkungan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar dapat hidup sehat. Masyarakat dapat hidup dengan layak dengan menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hamim Thohari dalam wawancara berikut ini:

*“salah satu upaya dari menjaga kebersihan lingkungan itu dengan mengurangi sampah. Hal tersebut merupakan salah satu langkah kecil yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Untuk pengelolaan sampah itu menggunakan system 3R (reduce, reuse, recycle). Kalau sampah basah itu diolah dengan system pengomposan. System pengomposan ada beberapa macam yaitu: pengomposan takakura, pengomposan dengan komposter aerob, kemudian dengan rumah kompos atau open window, terus pengomposan dengan iglo, dan pengomposan dengan galian tanah. Terkait dengan pengelolaan kalau sampah kering atau anorganik pengolahannya dengan pembuatan daur ulang, memanfaatkan kembali. Selain itu menyapu lingkungan tempat tinggal juga merupakan upaya dari menjaga kebersihan lingkungan.*



*masyarakat juga dapat melakukan kerjabakti rutin untuk menjaga lingkungannya tetap bersih.”<sup>10</sup>*

**Gambar 5.1 Tempat Sampah Organik dan Anorganik, Warga Desa Made  
RT 03, RW 03, Kecamatan Lamongan**



Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti, 2018

b. Penghijauan

Penghijauan merupakan upaya awal untuk menyelamatkan kondisi lingkungan di masa depan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menata dan memelihara kelestarian lingkungan menyebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan. Adapun hasil wawancara dengan bapak Hamim Thohari sebagai berikut

*“dalam indikator penilaian tersebut dijelaskan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, salah satunya dengan cara melakukan penghijauan. Jadi setiap tahun kita memiliki tema-tema yang berbeda. Misalnya tema warna-warni bunga, itu masyarakat diharuskan untuk menanam bunga-bunga dalam pot atau pekarangan mereka. Hal itu merupakan suatu langkah kecil untuk melestarikan lingkungan. Oksigen kan kebutuhan dasar manusia, lah oksigen*

---

<sup>10</sup> Ibid.



*dihasilkan oleh tanaman. Jadi dengan menanam tanaman di lingkungan rumah dapat menjaga kualitas oksigen.”<sup>11</sup>*

Melakukan penghijauan lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti yang disampaikan dalam wawancara tersebut. Menanam bunga dalam pot di pekarangan rumah juga bisa memiliki dampak yang besar di kemudian hari.

### c. Kesehatan Lingkungan

Menurut AL Slamet Riyadi kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan masyarakat modern yang meliputi terhadap semua aspek manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai kesehatan manusia pada tingkat setinggi-tingginya dengan jalan memodifisir tidak hanya faktor social dan lingkungan fisik semata-mata, tetapi juga terhadap semua sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan lingkungan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenangan, kesehatan dan keselamatan organisme umat manusia.<sup>12</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Peubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan Bapak Hamim Thohari, ST, M.Kes,:

*“dalam pelaksanaan LGC ini salah satu indikatornya itu kesehatan lingkungan. nah dengan adanya indikator-indikator ini peserta LGC harus membentuk kader-kader lingkungan, salah satunya adalah kader kesehatan lingkungan. minimal jumlah kader kesehatan lingkungan itu jumlahnya ada dua orang. Mereka bertugas untuk memeriksa jentik-jentik nyamuk di rumah warga setiap satu bulan sekali. Jumlah jumentiknya disesuaikan dengan banyaknya warga. Seperti kita ketahui bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat berharga. Lingkungan*

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> A. L. Slamet Ryadi. 1996, Pengantar Kesehatan Lingkungan. Surabaya: Usaha Nasional

*yang bersih dan sehat akan membawa dampak bagi orang yang tinggal di lingkungan tersebut*<sup>13</sup>

d. Bank Sampah

Program *Lamongan Green and Clean* merupakan program yang berfokus pada penghijauan dan kebersihan lingkungan. Salah satu komponen paling penting dalam pelaksanaan program ini adalah dengan pengurangan jumlah sampah. Adapun wawancara dengan bapak Hamim Thohari sebagai berikut,

*“adanya program LGC menuntut masyarakat untuk mampu mengelola sampah melalui bank sampah. meskipun dengan adanya bank sampah tidak dapat menghilangkan sampah secara seutuhnya, minimak bisa mengurangi jumlah volume sampah di TPA. TPA di Kabupaten Lamongan ini tidak terlalu besar, jadi harus ada kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah. Terlebih lagi dengan adanya bank sampah ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dari segi ekonomi”*<sup>14</sup>

Pengelolaan sampah domestik dengan menggunakan bank sampah merupakan salah satu perwujudan dari gerakan 3R yaitu (*reduce, reuse, recycle*). Pada awal pelaksanaan *Lamongan green and clean* gagasan mengenai bank sampah ini belum dilaksanakan. Bank sampah baru dilaksanakan pada tahun ketiga kegiatan *Lamongan Green and Clean*. Berikut ini adalah jumlah bank sampah di kabupaten Lamongan pada tahun 2016.

---

<sup>13</sup> Hamim Thohari., *Op.cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

**Tabel 5.2 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Lamongan**

Kategori Bank Sampah	Jumlah
Bank sampah perintis	525
Bank sampah berkembang	216
Bank sampah maju	37
Bank sampah mandiri	21
Bank sampah kencana	9
Bank sampah CC	3
<b>Jumlah</b>	<b>811</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2018

Bank sampah dijalankan oleh pengurus bank sampah yang telah ditetapkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sistem pelaksanaan bank sampah hampir mirip dengan koperasi. Setiap orang yang datang ke bank sampah dengan membawa sampah tidak akan diberikan uang secara langsung. Akan tetapi hasil dari perolehan bank sampah tersebut dicatat dalam buku tabungan bank sampah yang akan bisa diambil di akhir tahun. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Winarti yang merupakan masyarakat di Desa Made RT 3 RW 3:

*“kegiatan bank sampah rutin kita laksanakan minimal 2 minggu sekali, jadi sistemnya masyarakat itu dari rumah sudah memilah-milah sampah sesuai kategori, seperti botol plastik, gelas, koran, itu dipisahkan karena harga jualnya berbeda. Kemudian setiap sampah yang disetorkan itu akan dicatat oleh kader pengurus bank sampah dalam buku tabungan. Biasanya pembagiannya itu setiap akhir tahun pas hari raya.”<sup>15</sup>*

<sup>15</sup> Wawancara dengan Winarti selaku warga dari Desa Made RT 3, RW 3, Kecamatan Lamongan pada 22 Juli 2018

Adapun mekanisme pelaksanaan bank sampah menurut buku profil bank sampah kabupaten Lamongan tahun 2013 sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pemilahan sampah skala rumah tangga

Sebelum disetorkan pada bank sampah, masyarakat harus memilah sampah berdasarkan kategori. Sampah yang bisa disetorkan ke bank sampah adalah sampah domestik rumah tangga yang bisa didaur ulang misalnya, botol plastik, gelas plastik, koran dan lain sebagainya.

2. Penyetoran

Sampah yang sudah dipilah kemudian disetorkan pada bank sampah terdekat. Masyarakat bisa melakukan penyetoran sampah yang bisa didaur ulang pada saat kegiatan bank sampah dilakukan. Biasanya kegiatan ini dilakukan setiap satu minggu atau dua minggu sekali.

3. Penimbangan

Setelah masyarakat menyetorkan sampah kepada petugas bank sampah, sampah tersebut kemudian akan ditimbang untuk mengetahui jumlah dan nilai dari sampah tersebut. Berat sampah menentukan berapa nominal yang akan diterima oleh masyarakat.

---

<sup>16</sup> Buku profil pedoman pelaksanaan bank sampah Kabupaten Lamongan



#### 4. Pencatatan

Setelah sampah ditimbang, petugas bank sampah akan mencatat sampah yang sudah disetorkan dalam buku administrasi yang sudah ditentukan.

#### 5. Hasil sampah dilaporkan atau dimasukan dalam buku tabungan

Hasil dari pencatatan bank sampah yang sudah dicatat akan dilaporkan pada saat musyawarah warga sebagai laporan pertanggungjawaban .

**Gambar 5.2 Pelaksanaan Bank Sampah di Desa Made**



Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti, 2018

#### e. Administrasi Lingkungan

Yang dimaksud dengan administrasi lingkungan disini adalah adanya partisipasi dari kader-kader lingkungan dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hamim Thohari:

*“untuk kader lingkungan itu yang memilih adalah dari masyarakat mbak, biasanya mereka merupakan pengurus PKK di daerah tersebut. Kader ini memiliki peranan penting dalam terselenggaranya program Lamongan green and clean. Merekalah yang menggerakkan masyarakat untuk turut aktif dalam pelaksanaan program ini. Para*



*kader-kader ini biasanya akan kami kumpulkan pada saat sosialisasi. Mereka akan kami bimbing bagaimana tata pelaksanaan program ini dan eksekusinya di lapangan.”<sup>17</sup>*

Kader lingkungan terbagi atas beberapa kategori sesuai dengan indikator penilaian program. Mereka bertugas untuk mencatat seluruh aktifitas kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat.

#### f. Ikon

Ikon merupakan indikator yang hanya ada pada wilayah kencana dan *community center*. Setiap wilayah yang sudah masuk dalam kategori ini diharuskan memiliki ikon produk yang dapat dihasilkan.

**Gambar 5.3 Ikon Produk dari Desa Made RT 03, RW 03, Kecamatan Lamongan**



Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti, 2018

### 5.2.2 Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan ini meliputi sumber daya manusia, sumber dana dan waktu. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dari keberhasilan suatu

<sup>17</sup> Hamim Thohari., *Op.cit.*

kebijakan. Dalam pelaksanaan program *Green and Clean*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan merupakan sumber daya manusia yang berperan sebagai *implementor* program. Sedangkan masyarakat Kabupaten Lamongan menjadi objek pelaksanaan program. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hamim Thohari berikut ini:

*“Jadi program Lamongan Green and Clean ini memang dirancang untuk masyarakat kabupaten Lamongan. Dengan adanya program ini, kami mengajak seluruh masyarakat kabupaten Lamongan untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan.”*<sup>18</sup>

Sedangkan untuk pelaksanaan program ini sendiri sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. Selain itu dalam setiap pelaksanaan Program Lamongan *Green and Clean* pemerintah kabupaten Lamongan juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Bapak Hamim Thohari juga menambahkan pernyataan berikut ini:

*“Untuk pelaksanaan LGC sumber dananya dari APBD. Tapi biasanya pada saat launching kita melakukan kemitraan dengan Yayasan Unilever Indonesia sebagai hadiah doorprize untuk peserta launching LGC berupa produk-produk Unilever.”*<sup>19</sup>

Untuk sumber waktu dari pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* sendiri seperti yang sudah dijelaskan di awal dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2020.

---

<sup>18</sup> Hamim Thohari., op.cit.

<sup>19</sup> Hamim Thohari., op.cit.

### 5.2.3 Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana sangat penting dalam proses implementasi kebijakan karena berhasil tidaknya suatu kebijakan bergantung dari kedisiplinan para *implementornya*. Secara menyeluruh pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* diserahkan secara penuh pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Terkait dengan pelaksanaan Program Lamongan *Green and Clean*, Bapak Hamim Thohari menjelaskan bahwa:

*“Untuk pelaksana program LGC itu sendiri berada dibawah bidang tata lingkungan. mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dilaksanakan oleh bidang tata lingkungan yang terdiri dari seksi AMDAL, seksi tata lingkungan, dan seksi perubahan iklim dan pemeliharaan lingkungan”<sup>20</sup>*

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hamim Thohari terkait pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* di tangan oleh seksi AMDAL, seksi tata lingkungan, dan seksi perubahan iklim dan pemeliharaan lingkungan. berikut ini merupakan tugas dari masing-masing seksi tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2016:

- a. Seksi Amdal memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis LH), melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan, melaksanakan proses registrasi SPPL, menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan, melaksanakan proses izin lingkungan, melaksanakan proses pemeriksaan,

---

<sup>20</sup> Hamim Thohari., *op.cit.*

verifikasi dan penerbitan rekomendasi terhadap permohonan rekomendasi izin PPLH utamanya izin pembuangan air limbah, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.

- b. Seksi Tata Lingkungan memiliki tugas untuk melaksanakan intervensi data dan informasi sumber daya alam, melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJMD, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, menetapkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup, melaksanakan koordinasi dan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung serta daya tampung lingkungan, menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup, melaksanakan status lingkungan hidup daerah, melaksanakan indeks kualitas lingkungan hidup, melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH, menyusun dan mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis daerah, melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pemantauan dan evaluasi, menyusun kebijakan penataan lingkungan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.

- c. Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan

Memiliki tugas untuk melaksanakan perlindungan sumber daya alam, menyusun kebijakan dalam rangka pencadangan sumber daya alam, melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melaksanakan inventarisasi GKR serta penyusunan emisi GRK dan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.



Dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*, setiap seksi dalam bidang tata lingkungan memiliki tugas dan peranan masing-masing. Namun, dari ketiga seksi tersebut seksi perubahan iklim dan pemeliharaan lingkungan lah yang menjadi penanggungjawab pelaksana program.

#### **5.2.4 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan**

##### **Pelaksana**

Keberhasilan suatu program ditentukan bagaimana komunikasi yang dilakukan setiap pihak yang terlibat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal jika program ini berasal dari Instruksi Bupati No.1 Tahun 2011. Semenjak awal program ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan tanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana program.

Pada awal pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dibantu oleh Dinas PU Cipta Karya yang sekarang sudah berganti menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Akan tetapi sejak tahun 2016 program ini sepenuhnya dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dalam pelaksanaan program ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memberikan tanggung jawab kepada bidang Tata Lingkungan sebagai eksekutor program. Seluruh kegiatan terkait program dilaksanakan oleh bidang Tata Lingkungan. Bidang Tata Lingkungan melakukan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan program dengan seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lamongan. Hal ini dilakukan untuk mengajak



masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini. Komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan sangat penting dilakukan. Karena dengan adanya komunikasi terkait pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Lamongan akan mempermudah proses sosialisasi. Sehingga informasi mengenai standar dan tujuan kebijakan dapat tersampaikan secara jelas dan konsisten kepada masyarakat.

#### 5.2.5 Sikap Para Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.<sup>21</sup> Dari pendapat tersebut jika dibandingkan dengan pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* para pelaksana bersikap menerima kehadiran program ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Winarti yang merupakan warga dari Desa Made RT 3, RW 3, Kecamatan Lamongan sebagai berikut:

*“masyarakat di sini menyambut baik adanya program ini mbak. Karena pada dasarnya masyarakat di sini itu guyup dan mudah dikondisikan. Apalagi program inikan manfaatnya bisa kita rasakan. Lingkungan di sini jadi lebih tertata dan juga dengan adanya program ini bisa menambah nilai ekonomi. Bank sampah kita berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan. Adanya hadiah untuk para pemenang juga membuat warga sini semangat membenahi lingkungan di sini.”*<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sholihin Abdul Wahab., *op. cit.*, hal. 164

<sup>22</sup> Winarti., *op. cit.*

Selain itu penerimaan dari program ini juga dibuktikan dari jumlah peserta yang mengikuti program ini yang bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat penurunan peserta di tahun 2017, namun faktor penurunan jumlah peserta tersebut disebabkan adanya perubahan struktur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

#### **5.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi kinerja dari kebijakan publik. Kondisi lingkungan yang stabil dapat mendorong keberhasilan dari suatu kebijakan. Jika dilihat dari kondisi Kabupaten Kabupaten Lamongan pada saat ini cukup kondusif. Sehingga membuat program yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik. Begitupula dengan program Lamongan *Green and Clean* yang telah dilaksanakan dari tahun 2011 hingga saat ini. Eksistensi dari program ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan Kabupaten Lamongan cukup stabil sehingga program ini masih dipertahankan sampai saat ini.

Salah satu tujuan dari diadakannya program Lamongan *Green and Clean* adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bank sampah. Dengan adanya bank sampah masyarakat bisa memperoleh nilai tambah ekonomi dari sampah-sampah rumah tangga.

### 5.3 Dampak Lingkungan Serta Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Lamongan *Green and Clean*

#### 5.3.1 Dampak Pelaksanaan Kebijakan Lamongan *Green and Clean*

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki dampak secara langsung ataupun bisa menjadi solusi dari suatu permasalahan yang ada. Begitupula dengan pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* yang memiliki dampak langsung terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan. Dalam setiap pelaksanaannya program Lamongan *Green and Clean* memiliki target yang ingin dicapai. Berikut ini adalah target dan pencapaian program *Lamongan Green and Clean* dari tahun 2011 hingga 2017.

**Tabel 5.3 Target dan Capaian Program Lamongan *Green and Clean***

No.	Tahapan LGC dan Tema	Target Capaian	Capaian Riil
1.	LGC 2011 <i>Green and Clean</i>	a. RTH <i>private</i> 8-10% b. Jumlah kader lingkungan 930 orang c. Target pengelolaan sampah 3R sebesar 10% d. Peningkatan kebersihan dan keindahan	a. RTH <i>private</i> 10% b. Jumlah kader lingkungan 1050 orang c. Pengelolaan sampah 3R mencapai 12 % d. Peningkatan kebersihan dan keindahan

2.	LGC 2012 <i>Waste Lover</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RTH <i>private</i> 10-12%</li> <li>b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan</li> <li>c. Jumlah kader lingkungan 1830 orang</li> <li>d. Jumlah rintisan bank sampah 50 unit, bank sampah profesional 15 unit</li> <li>e. Target engelolaan sampah 3R sebesar 14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RTH <i>private</i> 14 %</li> <li>b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan</li> <li>c. Jumlah kader lingkungan 3.300 orang</li> <li>d. Jumlah Rintisan bank sampah 106, bank sampah profesional 20 unit</li> <li>e. Pengelolaan sampah 3R mencapai 18%</li> </ul>
3.	LGC 2013 Menuju Lamongan merdeka dari sampah melalui bank sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RTH <i>private</i> 13-17 %</li> <li>b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan</li> <li>c. Jumlah kader lingkungan 2130 orang</li> <li>d. Jumlah Rintisan bank sampah 27 di IKK kecamatan , bank sampah profesional sejumlah 80-100</li> <li>e. Target pengelolaan sampah 3R sebesar 15-20%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RTH <i>private</i> 18 %</li> <li>b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan</li> <li>c. Jumlah kader lingkungan 5.080 orang</li> <li>d. Jumlah Bank Sampah 166 unit, koperasi bank sampah 50 unit</li> <li>e. Pengelolaan sampah 3R mencapai 20%</li> </ul>
4.	LGC 2014 Warna wa rni bunga dan Merdeka dari Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RTH <i>private</i> 18-22 %</li> <li>b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan</li> <li>c. Jumlah kader lingkungan 7.445 orang</li> <li>d. Jumlah bank sampah 525 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RTH <i>private</i> 22 %</li> <li>b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan</li> <li>c. Jumlah kader lingkungan 7.985 orang</li> <li>d. Jumlah Bank Sampah 354 unit</li> </ul>

		e. Target Pengelolaan sampah 3R sebesar 20%	e. Pengelolaan sampah 3R mencapai 25 %
5.	LGC 2015 Semakin merdeka sampah menuju Green city	a. RTH <i>private</i> 23-26 % b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan c. Jumlah kader lingkungan 10.000 orang d. Jumlah Rintisan bank sampah 27 di IKK kecamatan , bank sampah profesional sejumlah 400-500 e. Target pengelolaan sampah 3R sebesar 25-27 %	a. RTH <i>private</i> 26 % b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan c. Jumlah kader lingkungan 11.642 orang d. Jumlah Bank Sampah 625 unit, koperasi bank sampah 50 unit e. Pengelolaan sampah 3R mencapai 27%
6.	LGC 2016 Semakin Merdeka Sampah dengan Seribu Bank Sampah	a. RTH <i>private</i> 27-30 % b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan c. Jumlah kader lingkungan 12.000 orang d. Jumlah bank sampah 1000 unit e. Target Pengelolaan sampah 3R sebesar 27 %	a. RTH <i>private</i> 31 % b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan c. Jumlah kader lingkungan 13.656 orang d. Jumlah Bank Sampah 811 unit e. Pengelolaan sampah 3R mencapai 30 %
7	LGC 2017 Tercapainya 1000 Bank Sampah menuju Lamongan Mer deka Sampah Tahun 2020	a. RTH <i>private</i> 31-33 % b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan c. Jumlah kader lingkungan 14.000 orang d. Jumlah Rintisan bank sampah 27 di IKK	a. RTH <i>private</i> 33 % b. Kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan c. Jumlah kader lingkungan 15.642 orang



		kecamatan , bank sampah profesional sejumlah 600 hingga 700 e. Target pengelolaan sampah 3R sebesar 28 hingga 32 %	d. Jumlah Bank Sampah 1011 unit, koperasi bank sampah 50 unit e. Pengelolaan sampah 3R mencapai 33 %
--	--	---	---

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2018

Jika dilihat dari tabel tersebut dapat dikatakan apabila program *Lamongan Green and Clean* hampir selalu mampu mencapai targetnya. Pada pelaksanaan *Lamongan Green and Clean* tahun 2016, program ini belum mampu mencapai target 1000 bank sampah. Jumlah bank sampah pada saat itu hanya mencapai 811 unit bank sampah. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana di beberapa wilayah kurang memadai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hamim Thohari sebagai berikut:

*“program ini mengajarkan masyarakat untuk menjadi mandiri dalam hal menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Selama ini masyarakat sukarela dalam hal pendanaan untuk perbaikan lingkungan.”<sup>23</sup>*

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menentukan sejauh apa perbaikan lingkungan yang dilakukan. Karena dalam menjalankan program ini masyarakat memerlukan dana untuk perbaikan lingkungan. Dalam pelaksanaanya masyarakat secara sukarela mau mengeluarkan dana pribadi demi perbaikan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Winarti selaku warga dari Desa Made RT 3, RW 3, Kecamatan Lamongan:

<sup>23</sup> Ibid.

*“pada awalnya ya kita seadanya saja mbak. Karena gak punya dana sepeserpun. Dananya ya minta kalau misal mau ada penilaian, kita minta kepada orang-orang yang mampu”<sup>24</sup>*

Meski demikian selama pelaksanaan LGC dari tahun 2011 hingga 2017 sudah hampir dapat mencapai seluruh target pencapaiannya. Dampak dari pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sejak dilaksanakannya program Lamongan *Green and Clean* lingkungan tempat tinggal masyarakat yang melaksanakan program ini lebih tertata rapi dan bersih. Berikut ini adalah salah satu contoh kondisi lingkungan sebelum dan sesudah melaksanakan program Lamongan *Green and Clean*.

**Gambar 5.4 Kondisi Wilayah di Kabupaten Lamongan Sebelum dan Sesudah Melaksanakan Program Lamongan *Green and Clean***



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Dapat dilihat dari gambar diatas terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari kondisi lingkungan wilayah yang telah melaksanakan Program Lamongan

---

<sup>24</sup> Winarti., *Op.cit.*

*Green and Clean*. Setelah wilayah tersebut melaksanakan program Lamongan *Green and Clean* kondisi lingkungan di wilayah tersebut lebih tertata dan asri.

Selain itu adanya program Lamongan *Green and Clean* juga berdampak positif terhadap citra pemerintah Kabupaten Lamongan. Berkat dilaksanakannya program Lamongan *Green and Clean* Kabupaten Lamongan berhasil memperoleh penghargaan Adipura Kencana. Adipura Kencana merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup kepada daerah kota atau kabupaten yang berhasil memperoleh penghargaan Adipura selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan Adipura diberikan pada kota yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

### **5.3.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Lamongan *Green and Clean***

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan program Lamongan *Green and Clean* adalah adanya dasar hukum yang jelas. Kabupaten Lamongan selama ini dikenal sebagai kota perdagangan dan perindustrian. Hal ini membuat pembangunan di Kabupaten Lamongan berjalan cukup pesat. Pesatnya perkembangan industri dan pertumbuhan penduduk membawa dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan yang kompleks menyebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan yang dapat memperburuk kondisi kota. Kurangnya ketersediaan sarana pengelolaan limbah mengakibatkan masalah lingkungan yang sulit ditangani. Adanya permasalahan tersebut membuat

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Lamongan *Green and Clean*.

Selain itu program ini merupakan bentuk realisasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Program ini menuntun masyarakat Kabupaten Lamongan untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan berbasis 3R (*reduce, reuse, recyle*) melalui bank sampah.

### **5.3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Lamongan *Green and Clean***

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan akan selalu menemui hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Begitupula dalam pelaksanaan kebijakan Lamongan *Green and Clean*. Dalam pelaksanaan kebijakan Lamongan *Green and Clean* terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah struktur badan. Sejak program ini dikeluarkan pada tahun 2011 jumlah peserta yang mengikuti program ini selalu naik. Hal ini tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program ini secara sukarela. Akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah peserta Lamongan *Green and Clean*. Berikut ini adalah tabel jumlah peserta *Lamongan Green and Clean* dari tahun 2011 hingga 2017.



**Tabel 5.3 Jumlah Peserta *Lamongan Green and Clean***

Tahapan LGC	Jumlah Peserta
LGC 2011	183
LGC 2012	236
LGC 2013	279
LGC 2014	800
LGC 2015	1135
LGC 2016	1502
LGC 2017	1027

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 2018

Jika dilihat dari tabel tersebut dapat dikatakan partisipasi masyarakat sangat baik dalam pelaksanaan program *Lamongan Green and Clean*. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah peserta *Lamongan Green and Clean* dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Namun di tahun 2017 jumlah peserta *Lamongan Green and Clean* menurun, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan struktur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Bapak Hamim Thohari, ST, M.Kes dalam wawancara berikut:

*“adanya perubahan struktur DLH, LGC tahun kemarin (2017) dilaksanakan oleh seksi lain dari bidang lain. pelaksanaan LGC yang biasanya dilakukan Januari, Februari atau Maret itu sudah dilaksanakan di tahun kemarin LGC baru dilaksanakan sekitar Juni, Juli. Tahun ini program LGC kembali dilaksanakan bidang ini. Tetapi karena tahun kemarin desember baru pengumuman juara, kalau dilaksanakan kembali di bulan januari atau february kan terlalu cepat, jadi kita bulan maret-april baru mulai workshop. Kemudian karena puasa jadi jadwalnya kita rencanakan mulai awal Juli. Tetapi karena*



*adanya perubahan libur lebaran yang cukup panjang dan adanya kegiatan lain jadi untuk kegiatan LGC diundur”<sup>25</sup>*

Selain itu penurunan jumlah peserta Program Lamongan *Green and Clean* juga disebabkan karena adanya faktor lain. Menurut Bapak Hamim Thohari faktor yang menjadi penyebab menurunnya partisipasi dan komitmen masyarakat tersebut adalah:

*“salah satu hambatannya ya kalau ada pergantian ketua RT atau kader yang sudah mulai semangat itu pindah keluar kota. Atau dari pejabat misalnya kepala desa atau camat yang sudah memiliki komitmen, kemudian diganti oleh pejabat lain yang tingkat komitmennya kurang itu mempengaruhi. Termasuk dari segi komunikasi, misalnya pada saat sosialisasi kita mengundang kades atau kader lingkungan mereka tidak menyampaikan apa yang kita sosialisasikan pada masyarakat, akhirnya kadang terjadi kesalahpahaman. Harapan kita seperti ini tetapi tidak dapat tercapai. Kalau dalam segi pelaksanaan pada saat penilaian itu terkait kondisi jalan dan jarak antar RT yang terkadang cukup jauh sehingga membuat kurang efektif dalam segi waktu.”<sup>26</sup>*

Adanya pergantian kepemimpinan pejabat terkait dapat mempengaruhi komitmen masyarakat dalam menjalankan program ini. Hal ini dikarenakan setiap pemimpin memiliki prioritas kerja masing-masing. Apabila pemimpin tersebut menjadikan program pelestarian lingkungan sebagai prioritas, maka dapat dipastikan kondisi di lingkungan tersebut akan baik. Namun sebaliknya apabila pelestarian lingkungan bukan merupakan prioritas kerja dari seorang pemimpin maka kondisi lingkungannyapun bisa jadi kurang baik.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan juga menjadi kendala. Kesadaran dari masyarakat merupakan kunci utama dari keberhasilan program ini. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa

---

<sup>25</sup> Hamim Thohari., *Op.cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggungjawab bersama. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mampu konsisten dalam menjalankan program Lamongan *Green and Clean* sesuai dengan indikator program. Kebanyakan dari peserta pelaksana program Lamongan *Green and Clean* hanya menjalankan kewajiban pada saat memasuki masa penilaian. Setelah masa penilaian selesai masyarakat kembali pada kebiasaan lama yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Mereka juga cenderung mengabaikan lingkungan yang sudah ditata rapi pada saat masa penilaian.

#### **5.4 Tinjauan Kebijakan Lamongan *Green and Clean* Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance*.**

Dari hasil analisis kebijakan Lamongan *Green and Clean* dalam pelaksanaannya jika dilihat dari perspektif *environmental governance*, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengatasi permasalahan lingkungan melalui program Lamongan *Green and Clean* sudah cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi apabila ingin mewujudkan *environmental governance* yang baik yaitu: pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi yang demokratis, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, daya penegakkan, konsisten dan harmonisasi sumber daya alam, dan kejelasan masalah lingkungan hidup.

Dalam pembahasan ini peneliti mengambil lima prinsip yang sesuai dengan pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, serta pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, transparansi, dan kejelasan masalah lingkungan hidup.

#### **5.4.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Lamongan *Green and Clean***

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kriteria yang harus dicapai agar *environmental governance* dapat tercapai. Karena pada prinsipnya *environmental governance* merupakan suatu tata kelola lingkungan yang mengutamakan adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat didalamnya. Hal ini dikarenakan dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitar diperlukan kerjasama antara manusia, manusia sangat berperan penting untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup tempat dimana ia tinggal. Mulai dari pemerintah dan sampai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa terkecuali.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Program Lamongan *Green and Clean* merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengajak serta masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di sekitar wilayah tempat tinggal. Sehingga dapat dikatakan jika partisipasi masyarakat menjadi komponen penting dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka

program ini hanya akan menjadi suatu wacana. Berikut ini adalah salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Lamongan *Green and Clean*

**Gambar 5.4 Kerja Bakti Masyarakat di Desa Made RT 02 RW 09**



Sumber : Dokumen pribadi peneliti, 2018

Dapat dilihat dari gambar diatas jika pemerintah Kabupaten Lamongan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan Program Lamongan *Green and Clean*. Program ini bisa menjadi sarana agar masyarakat turut serta dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* sudah mampu mencapai indikator pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena program Lamongan *Green and Clean* merupakan program yang dibuat pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan lingkungan.



#### 5.4.2 Pengakuan Terhadap Keterbatasan Daya Dukung Ekosistem Dan Keberlanjutan

Dalam penerapan *good environmental governance*, pengakuan terhadap daya dukung ekosistem dan berkelanjutan sangatlah penting. Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008. Akan tetapi peraturan daerah ini belum dapat dijalankan dengan maksimal. Hal tersebut terkait dengan kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat belum menyadari bahwa menjaga dan mengelola lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Dengan adanya kebijakan Lamongan *Green and Clean* pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan edukasi tentang pengelolaan lingkungan di wilayah *private* masyarakat. Kebijakan ini dikemas dalam bentuk perlombaan. Hal ini dilakukan untuk merubah cara berfikir masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Lamongan *Green and Clean* dalam penerapannya mengandalkan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Selain membuat masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan lingkungan, melalui program ini masyarakat juga secara sukarela mengeluarkan dana pribadi untuk mengelola lingkungan di lingkungan tempat tinggalnya. Melalui program ini masyarakat juga diberikan edukasi tentang bagaimana cara mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R melalui program bank sampah. Cara ini cukup efektif dalam mengurangi jumlah sampah dan pencemaran lingkungan. Selain itu program Lamongan *Green*



*and Clean* merupakan program yang dilakukan secara berkelanjutan dan dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2011 hingga saat ini. Hal ini dilakukan agar masyarakat terbiasa untuk mengelola lingkungan hidup di wilayahnya secara mandiri. Sehingga dapat menimbulkan efek yang positif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan.

#### **5.4.3 Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dan Masyarakat Setempat**

Dalam penerapan prinsip *good environmental governance* harus memberikan pengakuan hak masyarakat setempat dalam pelaksanaannya. Kabupaten Lamongan tidak memiliki masyarakat adat, hal ini membuat prinsip pengakuan terhadap masyarakat setempatlah yang menjadi acuan dalam kriteria ini.

Pelaksanaan prinsip ini berjalan beriringan dengan pelaksanaan prinsip pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Apabila dilihat dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* maka kriteria ini sudah terpenuhi. Program Lamongan *Green and Clean* menekankan pada adanya partisipasi masyarakat. Hal ini membuat kedudukan masyarakat setempat diakui dan diharapkan partisipasinya dalam program terkait pengelolaan lingkungan ini.

Selain itu hak masyarakat dalam pelaksanaan program ini juga sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan program. Sehingga membuat prinsip ini terwujud ketika pemerintah melakukan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 5.4.4 Transparansi

Transparansi merupakan salah satu kriteria yang sangat penting apabila ingin mencapai *good environmental governance*. Bentuk dari adanya transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah dengan membuka diri kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada masa awal pelaksanaan program. Sosialisasi yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan program Lamongan *Green And Clean*. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui tujuan dari diadakannya program ini.

Selain itu bentuk transparansi pemerintah terkait dengan pelaksanaan program ini adalah dengan pemberian pembekalan bagi kader-kader lingkungan yang ada. Sehingga dalam eksekusi program tidak terjadi kesalahpahaman tentang pelaksanaan program yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung membuat sebaran informasi terkait program tidak merata. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Lamongan membutuhkan media masa dalam penyebaran informasi terkait program. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan Jawa Pos untuk menyebarkan informasi tentang program kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh apak Hamim Thohari yang mengatakan bahwa:

*“Kita melakukan kerjasama dengan Jawa Pos itu kaitannya dengan pemberitaan. Jadi misalnya kita mau launching kita koordinasi dengan orang jawa pos untuk merikan pengumuman pada masyarakat. Begitu*

*juga pada saat penilaian LGC akan diberitakan di Jawa Pos pada tangal sekian sampai sekian penilaian akan di lakukan di RT mana.”<sup>27</sup>*

Adanya kerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan pemberithauan mengenai pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* mempermudah pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan informasi terkait program.

#### **5.4.5 Kejelasan Masalah Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lamongan**

Dalam pembuatan program berbasis lingkungan diperlukan adanya kejelasan masalah yang menjadi urgensi dalam pelaksanaan program. Jika dilihat dari indikator ini maka pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* sudah mencapainya. Masalah tingginya timbulan sampah yang ada menjadi latar belakang dibuatnya program ini.

Pada dasarnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memperbaiki kondisi lingkungan melalui program Lamongan *Green and Clean* hanya mampu memperbaiki kondisi lingkungan hidup *private* saja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Bapak Kusnaini, S.E., M.M sebagai berikut:

*“Dengan adanya Lamongan green and clean ruang terbuka hijau di Lamongan bertambah. Akan tetapi ruang lingkupnya kecil. Missal di satu wilayah RT kan satu taman, ya otomatis menambah ruang terbuka hijau tapi belum mampu mencukupi kebutuhan ruang terbuka hijau. Apalagi untuk program Lamongan green and clean kan jarang menanam pohon, kebanyakan hanya tanaman kecil padahal untuk*

---

<sup>27</sup> Hamim Thohari., *op. cit.*

*lahan terbuka itu kan pohonnya besar sebagai peneduh, menyerap oksigen seperti itu”<sup>28</sup>*

Selain itu Kepala Seksi Persampahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Bapak Darno, S.H memberikan penjelasan terkait kondisi sampah di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

*“adanya program Lamongan Green and Clean otomatis mempengaruhi jumlah timbunan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir. Pengelolaan sampahkan diselesaikan di tempat pembuangan akhir. Namun pada dasarnya faktor yang mempengaruhi banyak, tidaknya timbunan sampah itu pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk makan semakin bertambah sampahnya.”<sup>29</sup>*

Dari kedua pernyataan tersebut dapat dikatakan jika dengan adanya program Lamongan *Green and Clean* sudah cukup mampu mengatasi masalah lingkungan yang ada di Kabupaten Lamongan. Dalam prinsip konsep *environmental governance* terdapat beberapa aktor yang terlibat yaitu; pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya prinsip *enviromental governance* diterapkan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kusnaini, S.E., M.M sebagai berikut:

*“selama ini masih banyak masyarakat yang paham mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya PKL yang di pasar itu, mereka masih membuang sampah ke sungai. Kalau kesadaran masyarakat itu masih kurang otomatis apa yang kita lakukan itu bisa sia-sia. Karena menjaga lingkungan itu kan tanggungjawab bersama.”<sup>30</sup>*

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Bapak Kusnaini pada 13 Juli 2018

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Persampahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Bapak Darno pada 13 Juli 2018

<sup>30</sup> Kusnaini., *Op.cit.*

Melihat kondisi tersebut menyebabkan terkendalanya penyelesaian masalah lingkungan di Kabupaten Lamongan. Adanya program Lamongan *Green and Clean* hanya mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang berada di area *private*. Dibutuhkan adanya upaya lebih untuk mengatasi seluruh permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Lamongan.







## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik beberapa kesimpulan apa yang menjadi faktor yang mendukung program ini dapat berjalan dengan baik adalah adanya komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana. Serta adanya dasar hukum yang jelas mengatur tentang Program Lamongan *Green and Clean*. Program Lamongan *Green and Clean* dilaksanakan berdasarkan adanya Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011. Selain itu pelaksanaan program ini juga merupakan bentuk pengamanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya SDM di pemerintah sehingga membuat kinerja dari program ini belum bisa maksimal serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan juga menjadi penghambat pelaksanaan program ini. Partisipasi dari masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan program ini. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk mau merubah pola berfikirnya tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* jika dilihat dari prespektif *environmental governance*, bahwa sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance*. Hal ini juga

dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Adipura Kencana oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean*. Namun dalam pelaksanaan program ini prinsip-prinsip dari *good environmental governance* belum dapat diterapkan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan beberapa kriteria untuk mewujudkan *good environmental governance* belum dapat terpenuhi. Kriteria untuk mewujudkan *environmental governance* yang baik adalah: pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi yang demokratis, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, daya penegakkan, konsisten dan harmonisasi sumber daya alam, dan kejelasan masalah lingkungan hidup. Dari delapan kriteria tersebut program Lamongan *Green and Clean* hanya dapat memenuhi lima kriteria yaitu pemberdayaan masyarakat, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, serta pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, daya penegakkan, transparansi, dan kejelasan masalah lingkungan hidup sedangkan tiga kriteria lainnya yaitu desentralisasi yang demokratis, dan daya penegakkan belum dapat dipenuhi.

Belum terpenuhinya kriteria desentralisasi yang demokratis karena kebijakan ini merupakan inisiatif dari Bupati Lamongan yang dikeluarkan melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011. Selanjutnya kriteria yang tidak dapat terpenuhi dalam pelaksanaan program ini adalah konsisten dan harmonisasi sumber daya alam. Hal ini dikarenakan program ini tidak memiliki dan berkaitan langsung dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan yang terakhir kriteria daya penegakkan belum dapat dipenuhi karena tidak adanya sanksi yang diberikan

kepada masyarakat yang tidak mengikuti program ini. Hal ini disebabkan karena kebijakan ini hanya berupa Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 dan tidak ada dalam peraturan daerah. Sehingga apabila masa jabatan bupati yang menginstruksikan program ini berakhir, program ini bisa tidak dijalankan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan program Lamongan *Green and Clean* yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar program ini dapat berjalan dengan maksimal, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan perlu meningkatkan komunikasi langsung dengan masyarakat. Sehingga tujuan dari program dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus memberikan informasi yang lebih rinci terkait indikator dan sistem penilaian program kepada masyarakat.
2. Pemerintah juga harus memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan lingkungan terutama terkait mengatasi kebersihan lingkungan dengan mengelola sampah dengan baik dan benar.

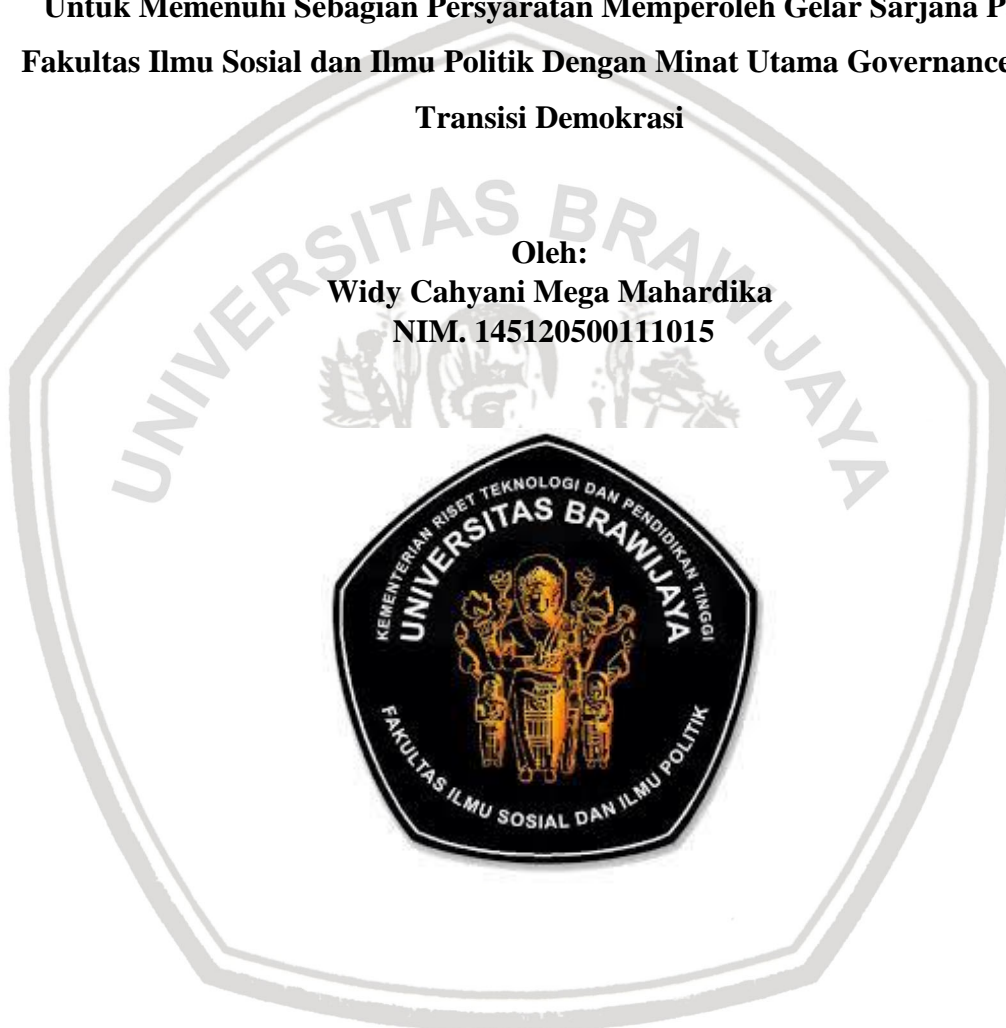
**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAMONGAN *GREEN AND CLEAN* DALAM PRESPEKTIF *ENVIRONMENTAL GOVERNANCE***

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Governance Dan  
Transisi Demokrasi**

**Oleh:**

**Widy Cahyani Mega Mahardika  
NIM. 145120500111015**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU POLITIK, ILMU PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN  
INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alex S, 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Andrew Heywood. 2013. *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS
- Citrawati Fitri Kartika, dkk, 2012. *Good Environmental Governance*, Malang: UB Press.
- David Marsh, Gerry Stoker. 2012. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Karawan A. Salikin. 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Leo Agustino. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Moelong, J. Lexy. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Niniek Suparni. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solichin Abdul Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarson. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi, Dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara.

### **Jurnal**

Mary Selitung dan Rombe Ryan. 2015. *Studi Pengelolaan Sampah Terpadu Di Tingkat Kelurahan Kota Makassar, Studi Kasus : Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang*. Makasar: Teknik Sipil Universitas Hasanudin

M. Azhar Anas, 2017. *Studi Deskriptif tentang efektivitas program Lamongan Green and Clean (LGC) di Kabupaten Lamongan*, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Nopyandari, 2011. *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jambi: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Jambi

Purwo Santoso, 2003, *Kapasitas Pemerintah Daerah Mewujudkan Good Environmental Governance*, Renai: Jurnal Politik Lokal dan Sosial.

### **Skripsi**

Manik Muhayati, 2016. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pespektif Good Environmental Governance*, Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sutrisno Teguh. 2016. Skripsi: *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2015*. Malang: Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### **Internet**

*Jumlah Penduduk Menurut Kelomok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta*, diakses pada 30 Maret 2017 Pukul 17.32 WIB dari <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/142/jumlah-penduduk->

[menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html](#)

Silvia Rahmatina. 2017. *Ini 5 Faktor Penyebab Banjir Jakarta, Enggak Cuma dari Cuaca Ekstrem* diakses pada 30 Maret 2017 Pukul 18.26 WIB dari <https://news.okezone.com/read/2017/12/13/338/1829648/ini-5-faktor-penyebab-banjir-jakarta-enggak-cuma-dari-cuaca-ekstrem>

Data BPS Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lamongan tahun 2016, diakses pada 14 Maret 2018 Pukul 19.08 WIB dari <https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2018/02/08/959/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-lamongan-2016>

Ahmad Hilmi Abdillah, 2013. *Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pertambangan dan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan lingkungan*. Diakses pada 15 Maret 2018 pukul 15.20 WIB dari [https://www.academia.edu/6636135/kesenjangan\\_implementation\\_kebijakan](https://www.academia.edu/6636135/kesenjangan_implementation_kebijakan)

Ajeng Dyah Irfanti, *Studi Opini Publik Program Lamongan Green And Clean Di Kabupaten Lamongan*, hal. 403. Diakses pada 11 April 2018 dari <http://journal.unair.ac.id/COMN@studi-opini-publik-program-lamongan-green-and-clean-di-kabupaten-lamongan-article-9325-media-137-category-8.html>

Amaludin, 2017. 2016, *Surabaya Hasilkan Sampah 1.500 Ton/Hari* diakses pada 14 Maret 2018 Pukul 18.49 WIB dari <http://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/ZkeWIVAN-2016-surabaya-hasilkan-sampah-1-500-ton-hari>

Hanif Sholahudin. 2013. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013*, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 12.30 WIB dari [https://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Studi Kasus Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013](https://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK_Studi_Kasus_Implementasi_Kebijakan_Kurikulum_2013)

Purwo Santoso. 2012. *Transformasi Wacana Dan Praksis Politik Lingkungan*. hal. 10 diakses pada 25 Maret 2018 pukul 15.34 WIB dari [https://www.academia.edu/2205555/TRANSFORMASI\\_WACANA\\_DAN\\_PRAKSIS\\_POLITIK\\_LINGKUNGAN](https://www.academia.edu/2205555/TRANSFORMASI_WACANA_DAN_PRAKSIS_POLITIK_LINGKUNGAN)

### Wawancara

Wawancara dengan Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Bapak Pak Hamim Thohari pada tanggal 28 Juni 2018

Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Ibu Puji pada tanggal 13 Juli 2018

Wawancara dengan Kepala Seksi Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Bapak Kusnaini pada 13 Juli 2018

Wawancara dengan Kepala Seksi Persampahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Bapak Darno pada 13 Juli 2018

Wawancara dengan Winarti selaku warga dari Desa Made RT 3, RW 3, Kecamatan Lamongan pada 22 Juli 2018